

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-NYA, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang Tahun 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan misi organisasi, sebagaimana Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini juga dapat dijadikan sebagai parameter atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran serta sekaligus merupakan media yang sistematis dalam upaya melakukan diagnosa guna mendeteksi sedini mungkin berbagai kelemahan dan kendala serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini nantinya diharapkan mampu memberikan jawaban atas keterbatasan pengelolaan sumber daya yang tersedia sekaligus sebagai media pembelajaran dalam upaya peningkatan kinerja dan pencapaian misi organisasi.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wonosalam, 07 Januari 2026

CAMAT WONOSALAM



YUDHA ASMARA, S.STP., M.E

Pembina

NIP. 198003031998101001

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan Pelaporan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjajian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Wonosalam sebagai Organisasi Pemerintah Daerah, dituntut untuk selalu melakukan pembenahan kinerja. Dengan pembenahan kinerja diharapkan dapat meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang selalu berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan Kecamatan Wonosalam, capaian tujuan dan sasaran serta selaras dengan tujuan dan sasaran Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik (good governance) memiliki 3 landasan utama, yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi merupakan harapan seluruh pihak. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate. Sehubungan hal tersebut, Kecamatan Wonosalam diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1. 1 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas Camat sebagai unsur Staf Pemerintah Daerah/Satuan Kerja Pemerintah Daerah adalah berkedudukan membantu Kepala Daerah dalam menjalankan kewenangan yang telah dilimpahkan dalam memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan serta bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang sebagaimana Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019, terdiri dari:

- a. Camat.
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi
- c. Seksi Tata Pemerintahan.
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan desa.
- e. Seksi Sosial Budaya
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan menurut Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Camat

Kantor Kecamatan Wonosalam dipimpin oleh seorang Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program, evaluasi dan kehumasan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, sekretariat mempunyai fungsi :

- Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian;

- Pengelolaan administrasi keuangan;
- Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- Pengelolaan urusan rumah tangga;
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Seksi;
- Pengelolaan kearsipan dan kehumasan;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- Pelaksanaan pengelolaan aset Kecamatan; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
- b. Melaksanakan urusan surat menyurat, penyetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
- c. Melaksanakan kegiatan pengadaan kebutuhan barang/jasa
- d. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- e. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Kecamatan;
- f. Menghimpun data aset dan melaksanakan ketatausahaan barang;
- g. Mengkoordinasikan dan menyusun Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal;
- h. Melaksanakan program dan pembinaan pelayanan di bidang informasi dan komunikasi;
- i. Melaksanakan kegiatan kehumasan, publikasi, dan dokumentasi; dan
- j. Membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- l.

b. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi

Sub Bagian Penyusunan Keuangan, Penyusunan Program, dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;
- e. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;
- f. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
- g. Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di lingkungan Kecamatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;
- c. Melaksanakan pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa;
- e. Melaksanakan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

- f. Melaksanakan evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- g. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN);
- h. Melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan dan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas pembantuan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas:

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta terhadap perangkat Desa dan Kelurahan serta tertib administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan;
- c. Melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan Desa/ Kelurahan di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah maupun swasta;
- d. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.
- e. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- f. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bidang PKK; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

5. Seksi Sosial Budaya

Seksi Sosial Budaya, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pengumpulan bahan dan data pelaksanaan, evaluasi di bidang sosial budaya;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang sosial budaya;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi bidang sosial budaya;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olahraga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan;
- f. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat Kecamatan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas:

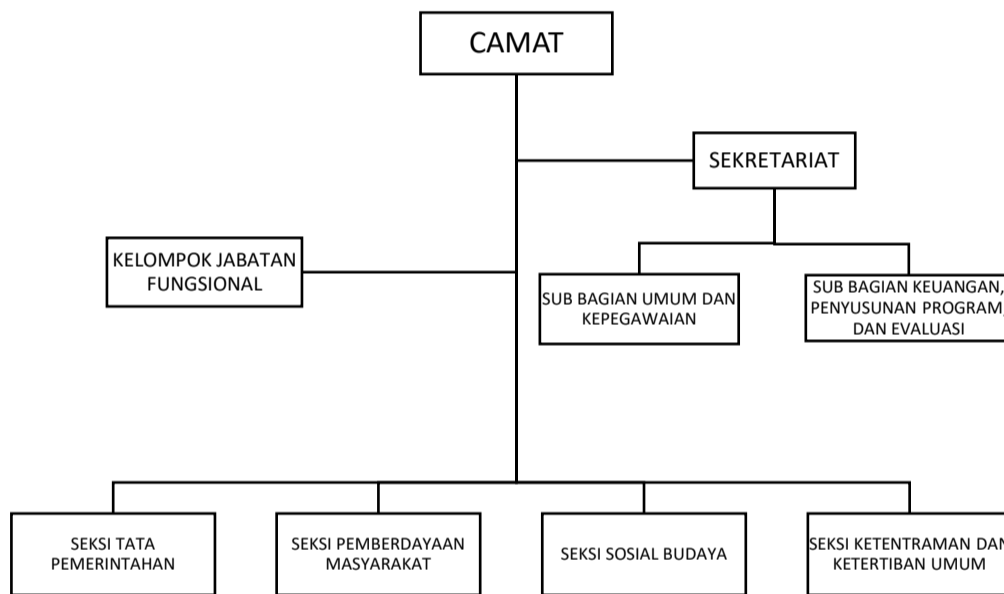
- a. Melaksanakan penyusunan program guna menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan bencana;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan perangkat Kecamatan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja Kecamatan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, pihak lain termasuk TNI/POLRI dan Pemuka Agama di wilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- g. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Melaksanakan laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- i. Melaksanakan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas Camat; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Adapun bagan susunan organisasi Kantor Kecamatan Wonosalam tersaji dalam Gambar 2.2.

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Kecamatan Wonosalam



Sumber Data: Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019

1. 2 Tugas dan Fungsi

Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang Tahun 2018, Kecamatan mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan singkat&at;

3. Pengkoordinasian 9ingkl penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di 9ingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

1.3 Isu Strategis

Isu strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang serta berdasarkan dinamika lingkungan strategis adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Kinerja Pelayanan OPD
Tingkat Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Wonosalam dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Wonosalam, adalah:

1. Hambatan Geografis dan Infrastruktur

- **Aksesibilitas Wilayah:** Kondisi topografi yang berbukit seringkali menyulitkan mobilisasi petugas dalam melakukan pembinaan ke desa-desa terpencil.

- **Kerawanan Bencana:** Sebagai wilayah dataran tinggi, potensi hambatan akibat tanah longsor atau pohon tumbang dapat mengganggu jalur distribusi pelayanan publik dan komunikasi.

- **Infrastruktur Digital:** Belum meratanya jaringan internet (blank spot) di beberapa titik dusun menghambat implementasi sistem pelayanan berbasis elektronik (*e-government*).

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

- **Kuantitas dan Kualitas Aparatur:** Seringkali terjadi ketidakseimbangan antara jumlah personel dengan beban kerja yang luas. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas teknis terkait regulasi terbaru.

- **Kapasitas Perangkat Desa:** Sebagai mitra kerja kecamatan, kompetensi perangkat desa dalam hal administrasi keuangan dan penyusunan laporan terkadang masih bervariasi, sehingga memerlukan pendampingan ekstra dari pihak kecamatan.

3. Aspek Sarana dan Prasarana

- **Fasilitas Kerja:** Keterbatasan kendaraan dinas yang mumpuni untuk medan berat serta alat pendukung kantor yang perlu peremajaan guna mendukung percepatan pelayanan.

- **Gedung Pelayanan:** Ruang tunggu atau fasilitas pelayanan publik yang mungkin belum sepenuhnya standar dalam hal kenyamanan maupun aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

4. Koordinasi dan Sosial Budaya

- **Sinkronisasi Program:** Tantangan dalam menyelaraskan program kerja antara aspirasi masyarakat (hasil Musrenbang) dengan ketersediaan anggaran dari Pemerintah Kabupaten.

- **Partisipasi Masyarakat:** Membangun kesadaran kolektif masyarakat dalam urusan administrasi kependudukan atau pembayaran PBB seringkali terkendala jarak dan pola pikir tradisional.

Keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Wonosalam pada tahun 2025 adalah merupakan upaya dalam mencapai target dan sasaran pembangunan dimana hal tersebut telah ditetapkan di dalam tujuan dan sasaran dokumen RPD 2024-2026 untuk kinerja tribulan 1 sampai 3 dan mendasarkan pada tujuan sasaran renstra 2025-2029 untuk tribulan 4 dan target tahunan 2025, yakni untuk menghasilkan produk-produk perencanaan yang berkualitas dan akuntabel, dalam artian bahwa perencanaan pembangunan dilakukan dengan terukur dan tepat sasaran, baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga memudahkan didalam proses monitoring, evaluasi maupun pengendalian serta nantinya diharapkan dapat memberikan arah dan kebijakan dalam mengatasi permasalahan/hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terjadi pada tahun berjalan.

3. Dampaknya terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah adalah:
 - a. Terhambatnya pemenuhan target dan sasaran yang telah ditetapkan didalam dokumen RPD Kab. Jombang Tahun 2024-2026 dan juga Renstra 2025-2029
 - b. Keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan yang berdampak pada kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat dan tingkat kesejahteraan
 - c. Anggaran dana yang tertuang dalam DPA Kecamatan Wonosalam belum dapat mengakomodir seluruh kebutuhan sehingga berdampak pada pencapaian prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 yang tertuang dalam dokumen RPD Kab. Jombang tahun 2024-2026 dan Renstra 2025-2029 yakni Peningkatan kualitas pelayanan hingga keamanan dan ketentraman umum, Peningkatan kualitas pelayanan dasar untuk mewujudkan SDM yang unggul serta pengentasan kemiskinan ekstrem, Memperkuat infrastruktur berkelanjutan untuk mendukung peningkatan investasi, daya saing dan produk unggulan daerah.
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD.

Tantangan:

- a. Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan perangkat lunak maupun perangkat keras sehingga mempengaruhi kelancaran proses pelayanan;
- b. Jaringan Internet yang masih sering crowded berpengaruh pada terhambatnya proses pelayanan kepada masyarakat;
- c. Terbatasnya jumlah personil yang mempunyai dalam melaksanakan tugas pelayanan;
- d. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang berkualitas terkait dengan peningkatan pelayanan publik;
- e. Perubahan KTP SIAK menjadi e- KTP di Kecamatan Wonosalam saat ini belum bisa maksimal dikarenakan perangkat perekaman e – KTP terkadang tidak dapat dioperasikan yakni alat perekaman sidik jari dan iris mata terkadang trouble sehingga pemohon disarankan untuk perekaman di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Jombang;
- f. Pemohon KK dan e-KTP di wilayah Kecamatan Wonosalam cukup banyak, sedangkan petugas operator hanya 1 (satu) orang yang ditangani meliputi cetak KK, Pengantar KK dan e-KTP (Barcode) dan

perangkat scanner hanya 1 (satu) yang bisa dioperasikan sehingga pelayanan kurang maksimal .

Peluang :

- a. Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada;
- b. Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada dengan ditunjang pemeliharaan secara berkala;
- c. Mengikutsertakan pelatihan secara teknis bagi operator pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan terkait dengan penggunaan alat dan cara menghadapi masyarakat secara santun dan menyenangkan;
- d. Meningkatkan kualitas sarana prasarana pelayanan dan fasilitas ruangan tunggu bagi pemohon melalui anggaran operasional Kecamatan ;
- e. Untuk memperkuat kapasitas dan menjaga motivasi kerja pegawai diperlukan pelatihan dan bimbingan teknis secara berkelanjutan, sebagai upaya merespon tuntutan eksternal untuk selalu memperbaiki kinerja serta optimalisasi dukungan dari atasan, sistem pengendalian intern dan pengawasan melekat.

Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi tantangan yang terkait dengan pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di Kecamatan Wonosalam terlaksana dengan baik, tertib dan lancar.

5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah:
 - a. Perencanaan Pembangunan
 - Dalam Perencanaan Pembangunan pada Tahun Anggaran 2025, telah dilaksanakan melalui kegiatan Musrenbangcam, tetapi masih terdapat beberapa usulan yang belum terealisasi, dikarenakan terbatasnya anggaran pada APBD Kabupaten Jombang.
 - Diperlukan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dengan melibatkan stakeholder terkait untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan rencana strategis atau RPD tahun 2024-2026 serta Renstra 2025-2029 sehingga diperlukan output yang lebih aspiratif.
 - Ketersediaan data tahunan yang valid dan mutakhir sebagai modal database dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

b. Keamanan dan Ketertiban

Setiap tahun Kecamatan Wonosalam dalam bidang keamanan dan ketertiban melakukan penertiban, pembinaan, pemantauan sehingga wilayah Kecamatan Wonosalam dalam kondisi aman, nyaman, tertib dan kondusif dan untuk meningkatkan kinerja perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana pendukung.

c. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Pada Tahun Anggaran 2024, telah berhasil dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Wonosalam melalui 6 (Enam) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 25 (Dua Puluh Lima) Sub Kegiatan.

d. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

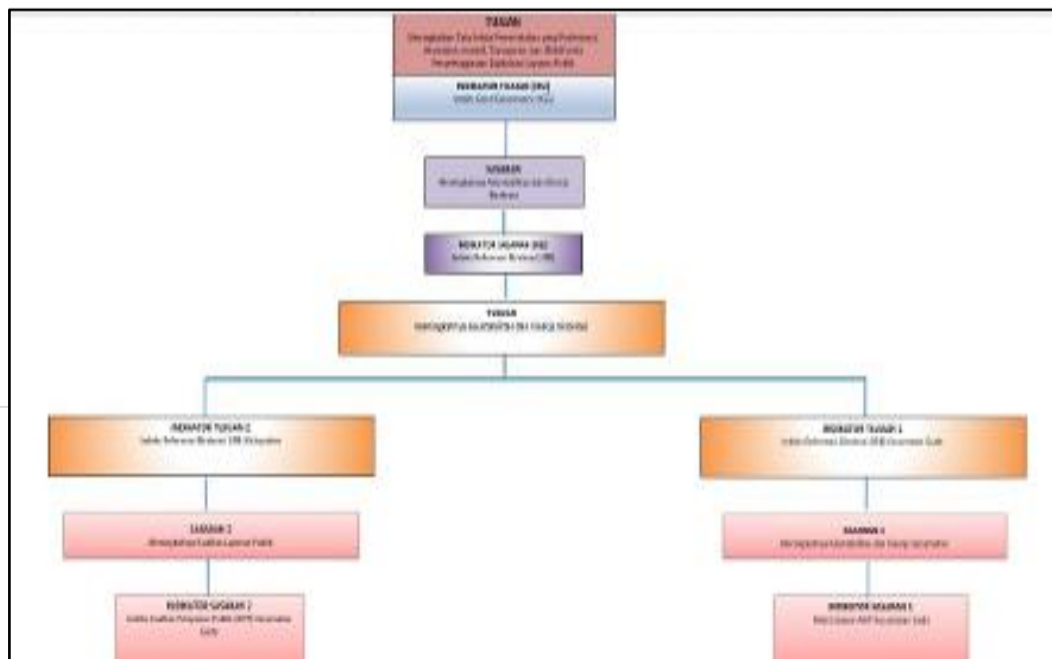
Diperlukan pembinaan lebih intensif dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa agar potensi yang ada dapat lebih berkembang serta dapat bersaing di setidaknya di tingkat Kabupaten kemudian di tingkat Provinsi.

Sejauh ini tingkat kinerja Kecamatan Wonosalam sampai dengan tahun 2025 sebagaimana yang telah ditargetkan dapat direalisasikan dengan baik sesuai perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang baru, dimana hal ini membawa dampak yang cukup signifikan terhadap kebijakan daerah dan kiranya perlu untuk menjadi perhatian pada tahun-tahun berikutnya.

1. 4 Cascading Kinerja

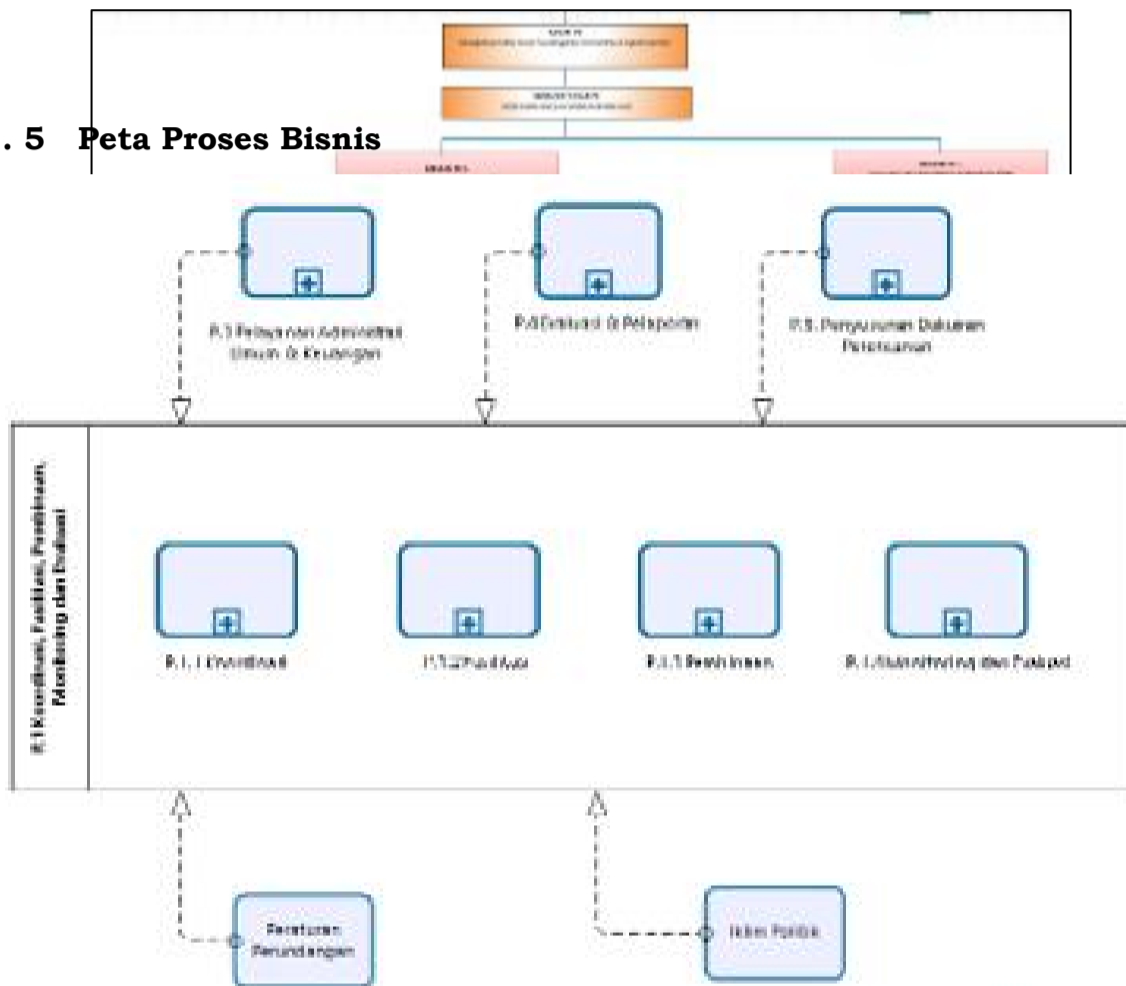
Tujuan dan Sasaran RPJMD telah dijabarkan dan diseleraskan dalam bentuk dokumen cascading keterkaitan tujuan dan sasaran kecamatan dengan tujuan dan sasaran antara RPJMD yang menunjang tercapainya Tujuan dan Sasaran Daerah, sebagai berikut:

Gambar 1.2 Cascading Kecamatan Wonosalam dasar RPD 2024-2025



Gambar 1.3 Cascading Kecamatan Wonosalam dasar Renstra 2025-2029

1. 5 Peta Proses Bisnis



S

Proses Bisnis Utama di Kecamatan P.1 Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam gambar di atas dapat dijelaskan bahwa core utama dalam poin P.1 terdapat Core dibawahnya yaitu Core Koordinasi yang mencakup proses bisnis tentang koordinasi antar kabupaten dengan kecamatan dan turun ke desa, Core Fasilitasi mencakup kegiatan fasilitasi program/kegiatan kabupaten kepada desa/masyarakat, core Pembinaan mencakup kegiatan pembinaan kapasitas aparatur desa, core monitoring dan evaluasi mencakup kegiatan monitoring dan evaluasi program/kegiatan pemerintah kabupaten yang di amanatkan ke pemerintah desa. Dari keseluruhan Core tersebut terdapat

variabel yang dapat mempengaruhi proses bisnis tersebut di antaranya variabel peraturan Perundang-undangan dan Iklim Politik.

1. 5 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Nomor 000.8.6.3/5639/415.10/2025, tanggal 31 Juli 2025, perihal Laporan Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang Tahun 2024 s/d Semester I Tahun 2025, Kecamatan Wonosalam memperoleh nilai 71.75 dengan predikat BB (Sangat Baik) dengan catatan hasil revidi sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Kecamatan Wonosalam telah menyusun rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025. Selain itu, Kecamatan Wonosalam juga sudah menyusun cascading dan pohon kinerja Perangkat Daerah. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja, diantaranya sebagai berikut:

1) Pohon kinerja yang disusun belum menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Layanan Publik” dengan indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) hanya dapat didukung oleh kinerja “Meningkatnya PATEN sesuai dengan standar”. Kinerja:

- a. Terlaksananya PHBN/PHBA dan monev sosial budaya sesuai aturan;
- b. Terlaksananya tindak lanjut rekomendasi Forkopimcam tepat waktu;
- c. Terlaksananya tindak lanjut kasus pelanggaran perda/perkada dan trantibum oleh instansi terkait tepat waktu;
- d. Terlaksananya koordinasi pertanggungjawaban realisasi APBDesa tepat waktu;
- e. Terlaksananya pembinaan dan pengawasan perencanaan pembangunan dan lembaga pemberdayaan masyarakat sesuai aturan; tidak memberikan hubungan sebab akibat dengan pencapaian Indeks Kualitas Pelayanan Publik.

2) PK Perubahan Tahun 2024 tidak ditetapkan tepat waktu sebagaimana ketentuan pada Peraturan Bupati Jombang Nomor

47 Tahun 2022 beserta perubahannya yaitu maksimal 1 bulan setelah P-APBD 2024 ditetapkan.

- 3) Masih terdapat pegawai yang belum melakukan perencanaan s.d rencana aksi TW 2 yang dapat dilihat pada tautan: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HhqOMbts6hsmwvtdgllr3W6VA-fShx9jO9PvRNSrOWM/edit?gid=850608247#gid=850608247>
- 4) Belum terdapat perbaikan perencanaan kinerja yang berdasarkan analisis perbaikan kinerja tahun sebelumnya karena terdapat penyajian data dalam dokumen LKjIP 2024 yang berisikan data dari Kecamatan lain.
- 5) Capaian Kinerja Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam LKjIP telah dijadikan dasar dalam perencanaan Tahun 2025 dibuktikan dengan adanya kenaikan target, namun berdasarkan hasil evaluasi lapangan belum seluruh pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

2. Pengukuran Kinerja

Kecamatan Wonosalam telah menyusun dokumen Penetapan IKU/IKI dan rencana aksi yang digunakan sebagai dasar untuk monitoring dan evaluasi progres kinerja. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Pimpinan terlibat dalam proses pengukuran kinerja sehingga pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien serta dilakukan secara berjenjang, namun demikian data kinerja belum dapat mengukur capaian kinerja yang diharapkan sesuai definisi operasional dari IKU/IKI.
- 2) Data kinerja telah dikelola dengan baik, namun demikian belum seluruhnya relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan sesuai definisi operasional IKU/IKI. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kode Unit: 415.10.3.3
- 3) Pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien, juga

terdapat efisiensi karena capaian kinerja lebih besar dari realisasi anggaran, namun tidak dijelaskan secara detail perhitungan efisien.

- 4) Berdasarkan hasil evaluasi lapangan, belum seluruh pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja, dan pengukuran kinerja yang dilaksanakan belum mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja.

3. Pelaporan Kinerja

Kecamatan Wonosalam telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2024 mulai dari level perangkat daerah hingga individu pegawai. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Dokumen LKjIP telah memenuhi standar sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 beserta perubahannya, namun tidak menyajikan analisis data yang kuat dan mendalam, hanya menarasikan / mendeskripsikan isi tabel.
- 2) Informasi yang terdapat pada LKjIP merupakan data yang berasal dari Kecamatan lain.
- 3) Berdasarkan hasil evaluasi lapangan, penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Kecamatan Wonosalam telah melakukan evaluasi internal atas implementasi SAKIP Perangkat Daerah yang mengacu pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 37 Tahun 2025. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Berita Acara Evaluasi Internal belum menyajikan analisis yang mendalam tentang kondisi saat ini, kendala yang dihadapi, serta upaya tindak lanjut yang relevan dan menjawab/sebagai solusi atas kendala pada seluruh komponen akuntabilitas kinerja. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai

Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kode Unit: 415.10.3.3

- 2) Seluruh rekomendasi hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 belum ditindaklanjuti, yang dibuktikan dengan belum adanya upaya tindak lanjut yang disampaikan pada Inspektorat Kabupaten Jombang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis dan Rencana Kinerja

2.1.1 Rencana Strategis (Renstra)

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespon tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredesain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap lingkungan strategis.

Guna menghadapi tantangan tersebut perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan. Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta

merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Program-program yang tercantum dalam RPD serta Renstra 2025-2029 ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Wonosalam pada periode Tahun 2025-2029.

Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review Rencana Strategis menunjukkan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang.

Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Wonosalam adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan:

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Subkegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan:

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan:

Administrasi Kepegawaian

Sub Kegiatan

1. Penyediaan Pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapannya

Kegiatan:

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor.
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan:

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Subkegiatan:

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan:

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan:

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 4.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan:

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Subkegiatan:

1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan:

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Subkegiatan:

1. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan:

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Subkegiatan:

1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan:

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Subkegiatan:

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah perencanaan di Desa
2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan:

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Subkegiatan:

1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan desa dan Pendayagunaan Aset Desa

2.1.2 Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025

Rencana Kerja tahun 2025 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran beserta indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2025. Rencana Kerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Perjanjian Kinerja yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2025. Adapun rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Renja 2025 sebagaimana terlampir.

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan tata cara reuiu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati Jombang dan Camat Wonosalam atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersagkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud pada kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Wonosalam Tahun 2025 mengacu pada dokumen RPD Kecamatan Wonosalam Tahun 2024-2026, serta Perjanjian Kinerja Perubahan mengacu pada dokumen Renstra 2025-2029. Dokumen Kertas Kerja Penetapan Target (KKPT) dan Perubahan KKPT Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 serta perubahannya.

Tujuan dari Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah : sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati Jombang dan Camat Wonosalam untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi terjadinya pergantian atau mutasi pejabat, dikarenakan:

- a. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran)
- b. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 2.1
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN JOMBANG

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	75
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	8.80
3.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	73.75

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Wonosalam	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	74.01
2.	Meningkatnya kinerja aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Wonosalam	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	76%
3.	Meningkatnya kinerja aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Wonosalam	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	75%
4.	Meningkatnya kinerja aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Wonosalam	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	49.50%
5.	Meningkatnya kinerja aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Wonosalam	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	75%
6.	Meningkatnya kinerja aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Wonosalam	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	75%

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(5)	(6)	(7)
1. 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.2.317.544.344,70	APBD
2. 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 10.675.000	APBD
3. 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 123.375.000	APBD
4. 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 16.934.000	APBD
5. 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 167.029.500	APBD
6. 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 11.715.000	APBD
	Rp. 2.647.272.844,70	

A. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik maka berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Kecamatan Wonosalam dengan Pemerintah, Pada tahun 2025 terdapat 2 indikator utama berdasarkan dasar penetapannya, yaitu IKU berdasarkan RPD untuk kinerja selama Tribulan 1 sampai 3 dan dirubah berdasarkan Renstra 2025-2029, yaitu sebagaimana tabel berikut:

1. IKU (RPD 2024-2026)

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kec. Wonosalam	Nilai Evaluasi AKIP Kec. Wonosalam tahun n	Hasil Evaluasi AKIP Kec. Wonosalam
		Definisi Operasional: Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi 4 komponen utama: yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas Kinerja. Penilaian dilaksanakan setiap setahun sekali berdasarkan hasil penilaian tim AKIP Kab. Jombang		
2.	Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Wonosalam	$IKPP = \frac{(IKM \text{ non konversi} \times 2,5) + (IPP \times 2)}{2}$	Hasil Survey IKM dan IPP Kec. Wonosalam
		Definisi Operasional: Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) adalah suatu nilai komposit yang memberikan persepsi yang sama atas capaian kualitas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) digunakan sebagai alat yang mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai kualitas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.		

		<p>Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Jombang mengakui pentingnya memiliki pemahaman yang holistik terhadap persepsi masyarakat dan komitmen penyelenggara pelayanan. Dua indikator utama yang mencerminkan perspektif yang berbeda ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Pelayanan Publik (IPP).</p> <p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat atas pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. IKM berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik meliputi 9 unsur yaitu: Persyaratan, Sistem/Mekanisme/Prosedur, Waktu Penyelesaian, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Penanganan Pengaduan/Saran/Masukan, dan Sarana/Prasarana. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Wonosalam diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Wonosalam melalui situs http://sukmasantri.jombangkab.go.id/</p> <p>Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik</p>		
--	--	---	--	--

		di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi (Permenpan RB No. 17 Tahun 2017). Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) diperoleh dari hasil penilaian Tim Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Pemkab. Jombang setiap setahun sekali.		
--	--	--	--	--

2. IKU sesuai Renstra 2025-2029

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama

NO .	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/RUMUS PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan Wonosalam tahun n	Hasil Evaluasi Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan	CAMAT

		<p>Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (IKKK) adalah ukuran komprehensif yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan dan kualitas pelaksanaan tugas, fungsi, serta tanggung jawab kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pembinaan pemerintahan desa, dan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah.</p> <p>IKKK mencakup lima aspek utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ○ Nilai Reformasi Birokrasi (RB) ○ Nilai SAKIP Kecamatan ○ Pelaksanaan Anggaran 2. Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, seperti: <ul style="list-style-type: none"> ○ Nilai PATEN ○ Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat ○ Nilai Indeks Pelayanan Publik Kecamatan ○ Tindak lanjut pengaduan masyarakat ○ Pelaksanaan delegasi wewenang dari Bupati 			
--	--	--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> ○ Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ○ Pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat/daerah ○ Penyelenggaraan <i>Rumah Bersama Kecamatan</i> ○ Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas umum ○ novasi/Kreativitas kecamatan pada Pelayanan Publik <p>3. Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Koordinasi pemberdayaan masyarakat ○ Fasilitasi kegiatan masyarakat bersama lembaga kemasyarakatan <p>4. Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional ○ Kerukunan antarumat dan ketertiban umum ○ Pelaksanaan Forkopimcam <p>5. Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa <p>6. Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Penanganan Bencana, meliputi:</p>			
--	--	---	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> ○ Koordinasi penerapan peraturan dan penanganan konflik sosial ○ Fasilitasi kegiatan tanggap bencana 			
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Wonosalam tahun n IKPP= (1,25x nilai IKM)+nilai IPP	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil Survey IKM Kec. Wonosalam melalui aplikasi https://sukmasantri.jombangkab.go.id/ - Hasil Evaluasi IPPKec. Wonosalam 	CAMAT
		<p>Definisi Operasional: Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) adalah indek komposit yang disusun dari nilai IKM dan nilai IPP. Pedoman penyusunan IKPP digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan penilaian kualitas pelayanan pada unit penyelenggara pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang. Komponen pembentuk IKPP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah nilai yang diperoleh dari rata-rata nilai hasil pengukuran SKM 			

		<p>terhadap unsur pelayanan periode akhir tahun berjalan.</p> <p>Unsur pelayanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persyaratan - System, mekanisme, dan prosedur - Waktu penyelesaian pelayanan - Biaya/tarif - Produk spesifikasi jenis pelayanan - Kompetensi pelaksana - Perilaku pelaksana - Penanganan pengaduan, saran dan masukan - Sarana <p>• Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah nilai kinerja penyelenggaran pelayanan berdasarkan aspek-aspek pelayanan. IPP adalah hasil penilaian akhir tahun berjalan oleh penilaian Tim Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Pemkab. Aspek-aspek pelayanan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan pelayanan - Profesionalisme sumberdaya manusia - Sarana prasarana - Sistem Informasi pelayanan Publik 			
--	--	---	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> - Konsultasi dan Pengaduan - Inovasi 			
3.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan Wonosalam tahun n	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	CAMAT
		<p>Definisi Operasional:</p> <p>Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan kecamatan, yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas.</p> <p>Penilaian Indeks RB dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tahunan Reformasi Birokrasi oleh Tim Evaluator Kabupaten, sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Jombang Nomor 108 Tahun 2023 tentang <i>Pedoman Pelaksanaan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</i>, serta mengacu pada prinsip-prinsip reformasi</p>			

		<p>birokrasi nasional yang menekankan aspek dinamis, kolaboratif, sinergis, dan berorientasi hasil.</p> <p>Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan terdiri dari dua komponen utama dengan bobot penilaian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Capaian Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (10%), yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ○ Pengelolaan Reformasi Birokrasi; ○ Rencana Aksi Reformasi Birokrasi; ○ Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 2. Capaian Sasaran Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (90%), yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel, dengan indikator seperti: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penataan kelembagaan; ▪ Implementasi sistem kerja baru; ▪ Indeks SPBE; ▪ Nilai SAKIP; ▪ Tingkat digitalisasi layanan; 			
--	--	---	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan Zona Integritas; ▪ Maturitas SPIP; ▪ Tindak lanjut pengaduan masyarakat; ▪ Indeks persepsi antikorupsi; ▪ Pengawasan kearsipan, pengadaan, dan pengelolaan keuangan serta aset. <ul style="list-style-type: none"> ○ Budaya birokrasi BerAKHLAK dan profesionalisme ASN, dengan indikator seperti: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengelolaan kinerja pegawai; ▪ Indeks profesionalitas ASN; ▪ Internalisasi Core Values ASN dan Employer Branding; ▪ Indeks Pelayanan Publik (IPP); ▪ Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). 			
--	--	--	--	--	--

Untuk menunjang tercapainya Indikator Tujuan Utama (IKU) Kecamatan Wonosalam pada akhir kinerja tahun 2025 yaitu berdasarkan pada Renstra 2025-2029 telah dirumuskan Indikator Program, Indikator Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan, sebagai berikut:

Tabel 2.4
Program, Sasaran Program, Indikator Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan, Sasaran Sub Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan
Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	FORMULASI
1	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Wonosalam	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	75.00	Nilai Evaluasi Akip Tahun n
	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 dokumen	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja kec Wonosalam tahun n Terdiri dari Renja, Renja P, Renstra LKJIP dan laporan monev kinerja tribulanan
	Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dok	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun tahun n
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	5 laporan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun tahun n

	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	1 lap	Jumlah laporan keuangan akhir tahun Kecamatan Wonosalam Tahun n yaitu Laporan keuangan keuangan akhir tahun SKPD atau CALK
	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Org/bln	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN tahun n
	2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD tahun n
	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD tahun n
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan pengadaan paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	N/a	Jumlah laporan penyediaan Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan kecamatan Wonosalam selama 12 bulan pada tahun n

	Sub kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	N/a	Jumlah pemenuhan Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan -----x100% Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan yang ditargetkan
	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan penyediaan barang dan jasa	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	12 laporan	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa kecamatan Wonosalam selama 12 bulan pada tahun n
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan tahun n
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	25 paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan tahun n
	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan tahun n
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 dokumen	Jumlah Pemenuhan dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan Pada tahun n
	penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	4 laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD tahun n

		Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan tahun n
	Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Tersusunnya laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 laporan	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tahun n
	Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 unit	Jumlah realisasi pengadaan sarana dan prasarana -----x100 Pengadaan sarana dan prasana yang ditargetkan
	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	2 laporan	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tahun n
	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 laporan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan tahun n
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan tahun n

	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	3 laporan	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah tahun n
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35 unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi tahun n
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi tahun n
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya tahun n
2	Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kinerja aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Wonosalam	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	76	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Wonosalam tahun n

	Kegiatan : Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Meningkatnya efektifitas pelayanan kepada masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang disusun tahun n
	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang disusun tahun n
3	Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya kinerja aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Wonosalam	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	75	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Wonosalam tahun n
	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada tahun n
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan pada tahun n
	Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada tahun n

	Sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan pada tahun n
4	Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya kinerja aspek Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Wonosalam	Capaian Nilai Aspek Ketenteraman dan Ketertiban Umum	49	Capaian Nilai Aspek Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Wonosalam tahun n
	Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun n
	Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun n

5	Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kinerja aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Wonosalam	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	75	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Wonosalam tahun n
	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18 dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang disusun tahun n
	Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18 dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang disusun tahun n
6	Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya kinerja aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Wonosalam	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	75	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Wonosalam tahun n
	Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada tahun n
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum	54 lembaga	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa pada tahun n

			musyawarah perencanaan pembangunan di Desa		
	Sub Kegiatan: peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada tahun n
	Sub Keg : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	54 lembaga	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa pada tahun n
					Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa tahun n

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Kecamatan Wonosalam sebagai SKPD pengemban misi organisasi melaksanakan kewajiban pertanggungjawaban melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

Tabel. 3.1
Skala Pengukuran Ordinal

No.	NILAI ANGKA	INTERPRETASI
1	> 100 % s/d 110 %	Istimewa (Sangat Berhasil)
2	> 80 % s/d 100 %	Baik (Berhasil)
3	> 60 % s/d 80 %	Butuh Perbaikan (Cukup)
4	> 20 % s/d 60 %	Kurang
5	0 s/d 20 %	Sangat Kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih

transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidaknya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Wonosalam memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Dokumen RPD Tahun 2024-2026 serta Renja Perubahan 2024.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Wonosalam diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan strategi yang tertuang dalam dokumen RPD untuk kinerja selama tribulan 1 sampai 3 dan menggunakan dasar Renstra 2025-2029 untuk kinerja pada tribulan 4 . Sehubungan hal tersebut, pada Tahun 2025, Kecamatan Wonosalam 1 tujuan dan memiliki 2 (dua) sasaran strategis yang dijabarkan dalam 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Wonosalam tahun 2025 diperoleh dari perbandingan antara target capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dengan realisasinya.

Selanjutnya dilaksanakan Evaluasi untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang ditemui agar dalam pencapaian misi dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa mendatang. Selain hal tersebut, dalam evaluasi kinerja dilaksanakan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh input tertentu.

Di dalam evaluasi kinerja, perlu untuk menggunakan beberapa pembandingan, meliputi :

3.1.1. Analisis semula-menjadi indikator Tujuan/Sasaran

Pada tribulan ke-4 tahun 2025, yang menjadi dasar dari Perjajian Kinerja Perangkat Daerah adalah Renstra 2025-2029 yang awalnya pada tribulan 1 samapai 3 mengggunakan dasar RPD 2024-2026, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel. 3.2. Analisis semula-menjadi indikator Tujuan/Sasaran

PK Awal			PK Perubahan		
Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan	Sasaran	Indikator
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan		Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan
	Meningkatnya akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Wonosalam		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik
		Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten		Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Wonosalam			

3.1.2. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan Wonosalam Tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

3.1.2.1. IKU berdasar pada RPD

**Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Wonosalam	74.01	71.75	96.94
Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kec Wonosalam	8.80	N/a	N/a
RATA-RATA CAPAIAN IKU (Tb.1-3)				99.94

Capaian IKU tersebut pada Tabel 3.2 tersebut di atas adalah capaian IKU berdasarkan RPD 2024-2026 yang dijadikan sebagai dasar IKU pada Kecamatan Wonosalam sampai dengan Tribulan 3. Dapat terbaca pada tabel tersebut bahwa baru indikator Nilai Akip yang sudah rilis,

sedangkan indikator Indek Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) belum rilis.

3.1.2.2. IKU berdasar pada Renstra 2025-2029

Tabel 3.4
Pencapaian Kinerja

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	75	76.49	101.98
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Wonosalam	8.80	9.32	105.90
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	73.75	78.23	106.07
RATA-RATA CAPAIAN IKU (Tb.4)				104.65

Dari tabel tersebut terlihat bahwa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat diketahui bahwa capaian indikator IKU Kecamatan Wonosalam Tahun 2025 telah berhasil dan melebihi target sebesar 104.65% dengan rincian sebagai berikut :

1. IKKK sebagai indikator atas Tujuan Kecamatan Wonosalam Tahun 2025 berhasil mencapai nilai 76.49 atau lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan yaitu 75. Dengan demikian capaian IKKK kecamatan Wonosalam pada tahun 2025 adalah sebesar 101.98%. Nilai IKKK adalah hasil dari perhitungan atas capaian 6 nilai aspek yang adalah merupakan indikator 6 program yang ada di kecamatan Wonosalam. Nilai IKKK bisa mencapai target yang tetapkan adalah karena ini merupakan indikator yang baru muncul sebagai kinerja yang mendasar pada Renstra 2025-2029. Dari 6 aspek ditetapkan yaitu sebagai berikut :

21	WONOSALAM	76.49	1. Aspek Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.61
			2. Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	56.60
			3. Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	7.00
			4. Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.50
			5. Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7.00
			6. Aspek Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	6.78

2. IKPP Kecamatan Wonosalam ditargetkan 7.9 dan tercapai 8.96 dengan tingkat capaian 113.42 % berdasarkan Keputusan Bupati Jombang Tentang IKPP bagi organisasi penyelenggara pelayanan publik tanggal 12 November 2025 Nomor ; 100.3.3.2/406/415.10.13/2025. Nilai IKPP tersebut merupakan konversi dari nilai IKM dan IPP,yaitu sebagaimana berikut :
- Nilai IKM Kecamatan Wonosalam berdasarkan Keputusan Bupati Jombang Tentang IKM bagi organisasi penyelenggara pelayanan publik tanggal 12 November 2025 Nomor ; 100.3.3.2/405/415.10.13/2025 adalah 99.74. Nilai tersebut berhasil didapatkan lebih tinggi dari capaian nilai IKM tahun 2024 yaitu 98.33. Kenaikan nilai IKM Kecamatan Wonosalam bisa diarahkan atas kerjasama yang baik dari semua tim pelayanan di Kecamatan Wonosalam serta adanya dukungan dari pimpinan serta telah terpenuhinya sebagian besar fasilitas penunjang pelayanan masyarakat, sehingga masyarakat bisa memberikan penilaian yang memuaskan atas kinerja pelayanan di Kecamatan Wonosalam sesuai Permenpanrb No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik.
 - Nilai IPP Kecamatan Wonosalam pada tahun 2025 adalah 4,34 berdasarkan pada Keputusan Bupati Jombang Tentang IPP bagi organisasi penyelenggara pelayanan publik tanggal 12 November 2025 Nomor ; 100.3.3.2/407/415.10.13/2025. Nilai IPP kecamatan Wonosalam juga mengalami kenaikan dari tahun 2024 yang tercapai 3,81. Penilaian IPP didasarkan pada beberapa penilaian PEKPP yang diselenggarakan oleh bagian organisasi Kabupaten Jombang.
3. IRB adalah indikator IKU ketiga yang juga mengalami kenaikan pencapaian kinerja. Yaitu berhasil tercapai 78,23 dai target 73.75 atau sebesar 106.07%. Jika dibandingkan tahun kemarin yaitu

74,63 maka untuk tahun ini maka IRB kecamatan Wonosalam mengalami kenaikan yang memuaskan. Namun perlu meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya dengan melakukan berepa perbaikan sebagaimana yang tertuang dalam LHE RB nomor : 000.8.6/10105/415.10/2025 tanggal 08 desember 2025, yaitu diantaranya adalah melakukan perbaikan pada strategi pelaksanaan RB PD serta beberapa indikator lainnya yang masih belum mencapai nilai maksimal.

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diatas diperoleh data dan informasi, sebagai berikut:

Tabel 3.5
Pencapaian Kinerja Sasaran
Kecamatan Wonosalam Tahun 2025

No.	NILAI ANGKA	INTERPRETASI	CAPAIAN
1	> 100 % s/d 110 %	Istimewa (Sangat Berhasil)	104.65%
2	> 80 % s/d 100 %	Baik (Berhasil)	
3	> 60 % s/d 80 %	Butuh Perbaikan (Cukup)	
4	> 20 % s/d 60 %	Kurang	
5	0 s/d 20 %	Sangat Kurang	

Selanjutnya sebagai pendukung keberhasilan capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Wonosalam Tahun 2025 berikut disajikan capaian kinerja masing-masing kegiatan dengan indikator yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

Tabel 3.6
Capaian Pengukuran Kinerja Sampai Akhir Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Wonosalam	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	74.01	71.75	96.94
	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 dokumen	8 dokumen	100
	Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dok	3 dok	100.00
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	5 laporan	100
	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%

	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Org/bln	10 orang/bln	100
	2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100
	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	100
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan pengadaan paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	N/a	N/a	N/a
	Sub kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	N/a	N/a	N/a
	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan penyediaan barang dan jasa	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	12 laporan	12 laporan	100
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	25 paket	25 paket	100.00
	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	100.00
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	100.00

	penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	4 laporan	100.00
	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	5 paket	100.00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	100.00
	Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Tersusunnya laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 laporan	1 laporan	100
	Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 unit	9 unit	100.00
	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	2 laporan	2 laporan	100
	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 laporan	25 laporan	100
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	24 laporan	100

	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	3 laporan	3 laporan	100
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	26 unit	26 unit	100.00
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	100.00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 unit	11 unit	100.00
2	Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kinerja aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Wonosalam	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	76	88	103.95
	Kegiatan : Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja	Meningkatnya efektifitas pelayanan kepada masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	12 laporan	12 laporan	100

	perangkat daerah yang ada di kecamatan		Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	100
3	Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya kinerja aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Wonosalam	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	75	58	77.33
	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 orang	100	100
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	4 dokumen	100
	Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 orang	100	100
	Sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	4 dokumen	100
4	Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya kinerja aspek Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Wonosalam	Capaian Nilai Aspek Ketenteraman dan Ketertiban Umum	49.50	57	48.98
	Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan	Terlaksananya koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan	12 laporan	12 laporan	100

	Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			
	Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	12 laporan	100
5	Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kinerja aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Wonosalam	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	75	38	50.67
	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	36 dokumen	36 dokumen	100
	Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	36 dokumen	36 dokumen	100
6	Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya kinerja aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	75	88	117.33

		Kelurahan Kecamatan Wonosalam				
	Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	4 laporan	100
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	54 lembaga	54 lembaga	100
	Sub Kegiatan: peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	4 laporan	100
	Sub Keg : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	54 lembaga	54 lembaga	100

3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

3.1.2.1. IKU berdasarkan RPD

**Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi		
			2023	2024	2025
Meningkatny Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP kecamatan Wonosalam	74.01	73.30	73.60	71.75
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Wonosalam	8.80	N/a	8.73	N/a

Tabel 3.6 diatas adalah realisasi capaian IKU sampai dengan Tribulan 3 yang kinerja masih mendasar pada RPD 2024-2026

3.1.2.1. IKU berdasarkan Renstra 2025-2029

**Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja**

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi		
			2023	2024	2025
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Wonosalam	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	74.01	73.30	73.60	71.75
Meningkatnya kinerja aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Wonosalam	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	76	N/a	N/a	83
Meningkatnya kinerja aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Wonosalam	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	49.50	N/a	N/a	58
Meningkatnya kinerja aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Wonosalam	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum	49.50	N/a	N/a	57

Meningkatnya kinerja aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Wonosalam	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	75	N/a	N/a	38
Meningkatnya kinerja aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Wonosalam	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	75	N/a	N/a	88

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi kinerja dari tahun 2023-2025 sebagai berikut:

- IKKK :

1. IKKK adalah indikator baru sehingga untuk rentang tahun 2023 – 2025 belum ada pembandingnya. Nilai IKKK adalah didasarkan pada akumulasi perhitungan nilai capaian aspek pada 6 program yang ada di Kecamatan. Dari 6 aspek tersebut keseluruhan memenuhi target.

Berikut adalah faktor-faktor pendukung keberhasilan pencapaian target tersebut:

1. Komitmen Manajerial dan Tata Kelola

- Kepemimpinan yang Kuat: Adanya kepemimpinan yang berfokus pada hasil, dibuktikan dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap capaian kinerja di setiap unit kerja.
- Perencanaan dan Penataan Organisasi: Melakukan penataan dan penguatan organisasi melalui penyusunan serta penetapan standar pelayanan yang jelas.
- Tindak Lanjut Evaluasi: Keberhasilan ini juga didukung oleh kemampuan tim dalam mengidentifikasi hambatan sejak dini dan segera melakukan rencana tindak lanjut (RTL) untuk menangani masalah jangka pendek maupun panjang tanpa hambatan berarti.

2. Sinergi dan Kolaborasi Antar-Lembaga

- Kordinasi Lintas Sektoral: Adanya sinergi yang baik antara pemerintah kecamatan dengan 9 desa, 45 dusun, serta lembaga masyarakat seperti RT, RW, dan PKK.
- Optimalisasi Peran Kader: Penguatan peran kader, misalnya melalui program pemberdayaan keluarga dan digitalisasi yang dilakukan oleh PKK untuk mewujudkan keluarga berdaya.

- Dukungan Pemerintah Kabupaten: Koordinasi yang harmonis dengan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam penyelarasan program kerja daerah agar tetap relevan dengan target IKKK.

3. Kualitas Pelayanan dan Partisipasi Publik

- Survei Kepuasan Masyarakat (SKM): Melakukan survei secara aktif untuk mendapatkan masukan langsung dari warga mengenai kualitas layanan. Hasil survei ini digunakan sebagai dasar intervensi untuk memperbaiki elemen layanan yang masih kurang.
- Inovasi Layanan: Implementasi sistem informasi atau aplikasi layanan (seperti inisiatif "WELAS") untuk mempermudah masyarakat mengakses informasi dan menyampaikan pengaduan secara *real-time*.
- Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Adanya dukungan terhadap UMKM lokal dan sektor unggulan daerah (seperti pertanian dan perkebunan) yang membantu pencapaian target di aspek ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

4. Teknis dan Sumber Daya

- Peningkatan Kompetensi Aparatur: Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pelatihan teknis bagi staf agar mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) secara profesional.
- Ketertiban Administrasi: Disiplin dalam pelaporan kinerja dan akuntabilitas birokrasi, sehingga seluruh data capaian dari 6 aspek program dapat terdokumentasi dengan akurat sebagai basis nilai IKKK.

2. Nilai IKPP baru menjadi indikator utama pada tahun 2024 karena pada tahun sebelumnya masih menggunakan nilai IKM dan IKPP. Nilai IKPP adalah hasil perhitungan yang diperoleh dari nilai IKM dan IPP. Nilai IKPP kecamatan Wonosalam pada tahun 2025 berhasil mencapai target yang ditetapkan, yaitu dari target 8.80 tercapai 9.32 atau 105.90%. Dengan rincian perolehan nilai IKM sebesar 99,74 dan nilai IPP 4,34.

Nilai IKPP berhasil mencapai target yang ditentukan tidak terlepas dari lonjakan maksimal pada nilai IKM kecamatan Wonosalam, Kecamatan Wonosalam telah melakukan banyak perbaikan pada aspek survey kepuasan Masyarakat ini diantaranya adalah dengan telah terpenuhinya Sebagian besar sarana dan prasarana penunjang pelayanan Masyarakat.

Sedangkan untuk nilai IPP sendiri adalah karena pada penilaian

PEKPP kecamatan Wonosalam tahun 2025 telah dapat mencukupi komponen aspek penilaian yang dibutuhkan.

Hal ini berbeda dari tahun 2024 dimana pada komponen IKM dan IPP masih banyak membutuhkan pebenahan.

3. Nilai RB kecamatan Wonosalam mulai tahun 2023 sampai tahun 2025 mengalami kondisi naik dan turun, sempat mengalami penurunan pada tahun 2024 yaitu dari 74.72 turun menjadi 73.70. Namun pada tahun 2025 berhasil naik Kembali yaitu 78,23. Kondisi dinamis ini dipengaruhi juga oleh 20 indikator penentu nilai RB dan juga strategis pelaksanaan RB. Terdapat beberapa indicator RB yang berubah pada mekanisme penilaiannya sehingga mempengaruhi hasil penilaian. Namun pada tahun 2025 kondisi ini tidak terjadi sehingga berhasil mendapatkan nilai IRB melebihi target yang ditentukan

- **INDIKATOR PROGRAM :**

1. Nilai Sakip Kecamatan Wonosalam adalah indikator Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan data pada tabel 3.8 tersebut, berikut adalah analisis mengenai fluktuasi (naik-turun) Nilai Evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Kecamatan Wonosalam dibandingkan dengan target tahunan sebesar **74.01**:

1. Tren Capaian Tahunan
 - Tahun 2023 (73.30): Capaian awal berada di bawah target dengan selisih 0.71. Hal ini menunjukkan performa awal yang cukup baik namun belum memenuhi ekspektasi target tahunan.
 - Tahun 2024 (73.60): Terjadi kenaikan sebesar 0.30 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun trennya positif (meningkat), angka ini masih belum mencapai target 74.01.
 - Tahun 2025 (71.75): Terjadi penurunan yang signifikan sebesar 1.85 poin dari tahun 2024. Ini adalah titik terendah dalam periode tiga tahun tersebut dan semakin menjauh dari target.

2. Analisis Penyebab Naik-Turun

Fluktuasi nilai AKIP biasanya dipengaruhi oleh empat komponen utama evaluasi (Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Internal). Berikut perkiraan penyebabnya:

Faktor Kenaikan (2023 ke 2024):

- Perbaikan Administrasi: Adanya penyesuaian yang lebih baik antara perencanaan strategis dengan anggaran.

- Peningkatan Kualitas Laporan: Laporan Kinerja (LKjIP) disajikan dengan data yang lebih akurat dan tepat waktu dibanding tahun sebelumnya.
- Tindak Lanjut Rekomendasi: Menindaklanjuti catatan dari tim evaluator internal kabupaten pada tahun sebelumnya.

Faktor Penurunan (2024 ke 2025):

- Ketidakselarasan Indikator: Kemungkinan adanya perubahan indikator kinerja (seperti munculnya IKKK sebagai indikator baru) yang belum terintegrasi sempurna dalam sistem akuntabilitas yang lama.
- Kualitas Evaluasi Internal Menurun: Kurangnya pengawasan internal di tingkat kecamatan untuk memastikan setiap program berjalan sesuai target yang direncanakan.
- Data Dukung Kurang Lengkap: Penurunan nilai sering terjadi karena dokumen bukti (eviden) pencapaian kinerja tidak terdokumentasi dengan baik atau tidak memenuhi standar kualitas penilaian terbaru.
- Efektivitas Program: Beberapa program mungkin terlaksana secara output (kegiatan selesai), namun secara outcome (manfaat/dampak) tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap sasaran strategis.

3. Rekomendasi Strategis

Untuk mengembalikan tren ke arah positif dan mencapai target 74.01, Kecamatan Wonosalam perlu:

- Review Rencana Aksi: Meninjau kembali apakah kegiatan di tahun 2025 benar-benar mendukung pencapaian sasaran "Meningkatnya Akuntabilitas".
 - Penguatan Eviden: Memastikan setiap tahapan kinerja didukung dengan dokumen atau data yang valid.
 - Pendampingan OPD Pembina: Melakukan asistensi intensif dengan Bagian Organisasi atau Inspektorat Kabupaten untuk membedah poin-poin mana yang menyebabkan nilai merosot di tahun 2025.
2. Nilai capaian Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah indicator baru pada tahun 2025 karena pada tahun sebelumnya bukan menjadi indicator Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik. Nilai capaian aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik tahun 2025 ditargetkan 76% dan terealisasi sebesar 83%. Tercapainya target pada aspek capaian nilai aspek ini adalah karena adanya tim

pelayanan di Kecamatan Wonosalam yang konsisten melakukan perbaikan serta pemenuhan sarana dan parasarana layanan public yang menunjang penilaian

3. Nilai capaian Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah indicator baru pada tahun 2025 karena pada tahun sebelumnya bukan menjadi indicator Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan tahun 2025 ditargetkan 75% dan terealisasi sebesar 88%. Berhasil tercapainya aspek penilaian ini adalah karena adanya sinergi yang baik antara pemerintah Desa serta kecamatan dalam membangun komunikasi serta pembinaan dalam rangka program pemberdayaan desa.
4. Nilai capaian Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa adalah indicator baru pada tahun 2025 karena pada tahun sebelumnya bukan menjadi indicator Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa tahun 2025 ditargetkan 75% dan terealisasi sebesar %. Pada capaian nilai aspek ini tidak berhasil tercapai karena adanya ketidaksiapan dalam pemenuhan bukti dukung penilaian yang dibutuhkan. Sehingga untuk tahun kedepannya bisa menjadi evaluasi demi perbaikan kedepannya
5. Nilai capaian Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum adalah indicator baru pada tahun 2025 karena pada tahun sebelumnya bukan menjadi indicator Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum tahun 2025 ditargetkan 75% dan terealisasi sebesar 58%. Pada capaian nilai aspek ini tidak berhasil tercapai karena adanya ketidaksiapan dalam pemenuhan bukti dukung penilaian yang dibutuhkan. Sehingga untuk tahun kedepannya bisa menjadi evaluasi demi perbaikan kedepannya.
6. Nilai capaian Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah indicator baru pada tahun 2025 karena pada tahun sebelumnya bukan menjadi indicator Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum tahun 2025 ditargetkan 49% dan terealisasi sebesar 57%. Pada capaian nilai aspek ini tidak berhasil tercapai karena adanya ketidaksiapan dalam pemenuhan bukti dukung penilaian yang

dibutuhkan. Sehingga untuk tahun kedepannya bisa menjadi evaluasi demi perbaikan kedepannya

3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

4.1.3.1. Kinerja berdasarkan RPD

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	76.00	71.23	93
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Wonosalam	8.88	N/a	N/a
Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Paten Kecamatan	75	N/a	N/a
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	N/a	N/a
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	N/a	N/a
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	N/a	N/a
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	N/a	N/a

	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	N/a	N/a
Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	N/a	N/a

3.1.3.2. Kinerja berdasarkan Renstra 2025-2029

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	75,8	76,49	100.91
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Wonosalam	8.05	9.32	115.77
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	74.05	76.23	100.98
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Wonosalam	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	76.00	71.23	93.72
Meningkatnya kinerja aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Wonosalam	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	78	88	112.82
Meningkatnya kinerja aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Wonosalam	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	77	58	75.32

Meningkatnya kinerja aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Wonosalam	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum	51	57	111.76
Meningkatnya kinerja aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Wonosalam	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	77	38	49.35
Meningkatnya kinerja aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Wonosalam	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	77	88	114.92

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi kinerja terhadap target akhir periode renstra sebagai berikut:

- **IKU :**

1. Capaian IKKK Kecamatan Wonosalam tahun 2025 terhadap target akhir renstra adalah 93.72%, target periode akhir renstra 76.00 dan pada tahun 2025 telah tercapai 71.23
2. Nilai IKPP Kecamatan Wonosalam telah berhasil mencapai target capaian renstra dengan tingkat kemajuan 115.77 %, target akhir periode renstra adalah 8.05 dan pada tahun 2025 telah tercapai 9.32
3. Nilai IRB Kecamatan Wonosalam telah berhasil mencapai target capaian renstra dengan tingkat kemajuan 100.98 %, target akhir periode renstra adalah 74.05 dan pada tahun 2025 telah tercapai 76.23

- **INDIKATOR PROGRAM :**

1. Nilai Akip Kecamatan Wonosalam telah berhasil mencapai target akhir renstra dengan tingkat kemajuan 98.15 %, target akhir periode renstra adalah 78,50 dan pada tahun 2025 telah tercapai 77,05.
2. Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 112.82 %, Target akhir periode renstra adalah 78 dan pada tahun 2025 telah tercapai 88

3. Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 75,32 %, Target akhir periode renstra adalah 77 dan pada tahun 2025 telah tercapai 58
4. Capaian Nilai Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 111.76 %, Target akhir periode renstra adalah 51 dan pada tahun 2025 telah tercapai 57
5. Capaian Nilai Capaian Nilai Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 49.45 %, Target akhir periode renstra adalah 77 dan pada tahun 2025 telah tercapai 38
6. Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 114.92 %, Target akhir periode renstra adalah 77 dan pada tahun 2025 telah tercapai 88

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan Realisasi kinerja di level nasional

3.1.4.1. Kinerja berdasarkan RPD

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional atau Pemerintah Provinsi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Realisasi Nasional atau kab/kota	Ket.
1	2	3	4	5
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Wonosalam	71.23	A	Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih predikat A (Memuaskan) dalam evaluasi SAKIP 2025 Hingga saat ini tidak ada angka skor SAKIP Provinsi Jawa Timur tahun 2025 (misalnya 80,00 atau 85,00) yang resmi dipublikasikan secara lengkap ke publik oleh Kementerian PANRB atau pemerintah provinsi

Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Wonosalam	9.32	N/a	Saat ini data nilai lengkap IKPP (Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan) atau IPP (Indeks Pelayanan Publik) untuk masing-masing kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2025 belum dipublikasikan secara lengkap dalam bentuk angka skor per daerah di sumber data yang tersedia secara umum
--------------------------------------	---	------	-----	--

3.1.4.2. Kinerja berdasarkan Renstra 2025-2029

Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional atau Pemerintah Provinsi

Tujuan/Sasaran	Indikator	Realisasi	Realisasi Jombang 2025	Realisasi Jawa Timur 2025	Realisasi Nasional 2025
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	76.49	76.49	N/A	N/A
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	9.32	8.56	N/A	N/A
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	76.23	N/A	N/A	N/A

Berdasarkan Tabel 3.10. Realisasi Kinerja Dibandingkan Dengan Standar Nasional, perbandingan capaian kinerja Kecamatan dengan capaian pada tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional dilakukan untuk mengetahui posisi relatif kinerja Kecamatan dalam konteks pembangunan pemerintahan yang lebih luas. Berdasarkan data pada tabel perbandingan, data pembanding yang tersedia pada Tahun 2025 baru terdapat pada tingkat Kabupaten Jombang, sementara data pada tingkat Provinsi Jawa Timur dan nasional belum dirilis (belum *release*) pada periode pelaporan ini, khususnya untuk indikator yang bersifat kewilayahan dan perangkat daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi kinerja terhadap realisasi kinerja di level nasional sebagai berikut :

1. Pada **tujuan “Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan”**, indikator Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan mencatat realisasi Kecamatan Wonosalam belum ditemukan pembandingnya baik pada tingkat nasional/provinsi. Istilah “Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (IKKK)” sendiri *tidak umum dipublikasikan sebagai indeks resmi nasional* oleh pemerintah Indonesia dalam konteks evaluasi kinerja kecamatan pada tahun 2025. Pemerintah pusat tidak merilis nilai IKKK secara nasional dalam sumber data publik yang tersedia untuk umum seperti yang dilakukan SAKIP atau IKK (Indeks Kualitas Kebijakan). Hingga kini, belum tersedia laporan resmi yang merangkum IKKK tingkat kecamatan 2025 dengan skor atau rata-rata nasional
2. Selanjutnya, pada sasaran 1 **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”**, indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik menunjukkan Realisasi Nilai IKPP tahun 2025 telah tercapai 9.32 dan tidak ditemukan pembanding dari nilai IKPP tingkat nasional. Meskipun tidak ditemukan nilai IKPP tingkat nasional/provinsi. Untuk IKPP Provinsi Jawa Timur sendiri, hingga kini belum tersedia angka resmi yang dipublikasikan secara terpisah di sumber berita atau data pemerintah yang tersedia secara umum. Namun dari hasil penilaian kinerja pelayanan publik (bagian dari komponen IKPP), Provinsi Jawa Timur meraih capaian sangat tinggi pada 2025
3. pada sasaran 2 **“Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif”** Realisasi nilai IRB tahun 2025 kecamatan Wonosalam berhasil tercapai 76.49, dan jika dibandingkan dengan nilai IRB provinsi Jawa Timur tahun 2025 yaitu 93,82, maka Kecamatan Wonosalam masih jauh tertinggal dan masih banyak untuk melakukan perbaikan kedepannya.

Secara keseluruhan, hasil perbandingan menunjukkan bahwa capaian kinerja Kecamatan Wonosalam pada indikator yang telah memiliki data pembanding terdapat di indikator yang diatas rata-rata, namun juga ada yang masih dibawah Nilai Jombang. Sementara itu, keterbatasan data pembanding pada tingkat provinsi dan nasional disebabkan oleh belum dirilisnya data resmi pada periode pelaporan serta perbedaan kewenangan dan metodologi pengukuran. Oleh karena itu, analisis kinerja difokuskan pada pembandingan tingkat kabupaten sebagai rujukan yang paling relevan, dengan tetap menjadikan capaian Tahun 2025 sebagai dasar evaluasi dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

2. Analisis atas Realisasi Kinerja

Pada tahun 2025 target IKU Kecamatan Wonosalam dapat tercapai dengan rata – rata capaian kinerja 104,65% dengan kata lain kinerja kecamatan dapat mencapai dan melebihi target yang telah ditetapkan pada semua indikator sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja.

3.1 Faktor penunjang/penyebab keberhasilan pencapaian kinerja

Meskipun capaian kinerja telah melampaui target, masih terdapat beberapa aspek yang **belum mencapai target**, yang disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, capaian rendah pada aspek ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia pengawas, belum optimalnya pembentukan dan pelaksanaan kerja Tim Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) Desa, serta lemahnya dokumentasi hasil pembinaan dan tindak lanjut. Selain itu, kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan perencanaan, keuangan, dan aset desa belum merata.
2. Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, belum optimalnya capaian pada aspek ini dipengaruhi oleh efektivitas forum koordinasi yang masih terbatas, baik dari sisi frekuensi pertemuan maupun kualitas tindak lanjut yang dihasilkan. Dokumentasi kegiatan pemerintahan umum juga belum tersusun secara konsisten dan terstandar.
3. Pendekatan pelaksanaan yang masih administratif, sebagaimana catatan dalam LHE Reformasi Birokrasi, sebagian rencana aksi dan kegiatan masih berorientasi pada pemenuhan dokumen administratif, belum sepenuhnya menunjukkan output perubahan substantif dan dampak langsung terhadap peningkatan kinerja.

3.2. Faktor Penghambat/Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja

- a. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi dalam implementasi beberapa kebijakan/peraturan yang ada di masing-masing stakeholder.
- b. Masih adanya tumpang tindih peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- c. Kompetensi SDM aparatur yang kurang memadai.
- d. Implementasi Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat utamanya pada point pelayanan rekomendasi Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) kurang relevan disebabkan terbatasnya

kemampuan SDM aparatur Kecamatan, sedangkan pada pelayanan bidang non perijinan point Mencetak Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk juga kurang relevan disebabkan kewenangan mencetak/menerbitkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah pada Dispendukcapil Kab. Jombang, kecamatan hanya berhak memverifikasi dan memvalidasi berkas permohonan penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

- e. Kurangnya pemahaman stakeholder terhadap penerapan SAKIP dalam menjalankan tupoksi.
- f. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pendukung pelayanan yang perlu dipenuhi.

3.3. Langkah-langkah yang diambil dalam pemecahan masalah

Alternatif Solusi dan Upaya Perbaikan Kinerja, sebagai tindak lanjut atas faktor-faktor penyebab kegagalan atau belum optimalnya kinerja, Kecamatan Wonosalam telah dan akan melakukan beberapa alternatif solusi sebagai berikut:

1. Penguatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- o Menyusun dan menetapkan SK Tim Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di tingkat kecamatan.
- o Menyusun rencana kerja Binwas Desa yang terstruktur dan terdokumentasi, mencakup pembinaan RKPDes, APBDes, BUMDes, aset desa, dan regulasi desa.
- o Meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui fasilitasi pembinaan dan pendampingan berkelanjutan.

1. Optimalisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- o Mengintensifkan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pembinaan wawasan kebangsaan dengan dokumentasi yang lengkap dan terstandar.
- o Mengoptimalkan forum koordinasi seperti Forkopimcam dan FKUB melalui pertemuan rutin dan tindak lanjut hasil rapat yang terukur.

2. Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- o Mendorong pembentukan dan penguatan Desa Tangguh Bencana (Destana) di seluruh desa secara bertahap.
- o Memperkuat koordinasi dengan FKDM dan pemerintah desa dalam deteksi dini dan pencegahan konflik sosial.

- o Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan.

3. Perbaikan Kualitas Perencanaan dan Monitoring Reformasi Birokrasi

- o Menyempurnakan rencana aksi Reformasi Birokrasi agar berorientasi pada hasil dan perubahan nyata.
- o Memperkuat monitoring dan evaluasi internal sebagai dasar perbaikan rencana aksi secara berkelanjutan.

3. Analisis program/ kegiatan/ sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis kinerja didasarkan pada hasil pengukuran kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dalam suatu sasaran strategis yang diharapkan. Sasaran strategis yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai jika tidak didukung dengan program dan kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian sasaran tersebut.

Untuk mendukung pencapaian tujuan Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan yakni

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
 2. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif
- Kecamatan Wonosalam menetapkan program,kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.13
Program, Kegiatan, Anggaran, Outcome/Output Yang Dihasilkan

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	% Capaian Anggaran	Menunjang/ Kurang
2	3	4	5			
Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	86,47	104,53	2,703,884,963	87.96	Sangat menunjang
Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 dokumen	100%	6,980,000	100.00	Sangat menunjang
Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	100%	5,480,000	100.00	Sangat menunjang
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	5 laporan	100%	1,500,000	100.00	Sangat menunjang

	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	1 laporan	100%	1,955,151,151	86,16	Sangat menunjang
Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8 dokumen	100%	1,883,804,151	85.71	Sangat menunjang
2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 dokumen	100%	70,647,000	100.00	Sangat menunjang
3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 laporan	100%	700,000	100.00	Sangat menunjang
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	12 laporan	100%	68,204,545	92.38	Sangat menunjang
Sub Kegiatan : 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	100%	3,236,800	100.00	Sangat menunjang
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 paket	100%	9,685,450	100.00	Sangat menunjang
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	100%	30.959.945	84.78	Sangat menunjang
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	100%	2,367,350	100.00	Sangat menunjang
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	100%	2,352,000	100.00	Sangat menunjang
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	100%	19,603,000	99.67	Sangat menunjang
Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 laporan	100%	149,535,600	97.98	Sangat menunjang
Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	91 unit	100%	149,535,600	97.98	Sangat menunjang

Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	2 laporan	100%	66,666,315	99.06	Sangat menunjan g
Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	100%	18,666,315	99.71	Sangat menunjan g
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 laporan	100%	48,000,000	99.48	Sangat menunjan g
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	3 laporan	100%	131,853,072	98.41	Sangat menunjan g
Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	100%	42,583,500	99.22	Sangat menunjan g
2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si	3 unit	100%	78,229,572	97.76	Sangat menunjan g
3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si	19 unit	100%	11,040,000	100	Sangat menunjan g
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	84%	110,42%	7,300,000	100	Sangat menunjan g
Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-					
Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	100%	7,300,000	100	Sangat menunjan g
Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	67%	88.89%		100	Sangat menunjan g
Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						
Sub Kegiatan : 1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 orang	100%	113,864,000	100	Sangat menunjan g
2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	100%	47,840,000	100	Sangat menunjan g

Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Nilai Aspek Ketenteraman dan Ketertiban Umum	49%	46%	11,540,000	100.00	Sangat menunjang
Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						
Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	12 laporan	100%	11,540,000	100.00	Sangat menunjang
Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	25%	33%	7,265,000	100	Sangat menunjang
Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 dokumen	100%		100	Sangat menunjang
Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	88%	116%	115,676,000	99.98	Sangat menunjang
Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						
Sub Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	78 lembaga	100%	14,110,000	100.00	Sangat menunjang
Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	100%	101,566,000	99.98	Sangat menunjang

Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Wonosalam Tahun 2025 secara umum telah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jombang, khususnya tujuan *Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*. Dukungan tersebut tidak hanya tercermin dari aspek penganggaran, tetapi juga dari berbagai kegiatan riil yang dilaksanakan sepanjang tahun dan memberikan kontribusi langsung terhadap capaian kinerja perangkat daerah. Keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Wonosalam didukung oleh beberapa program dan kegiatan utama sebagai berikut:

1. **Penguatan Perencanaan, Penganggaran, dan Akuntabilitas Kinerja.**

Melalui kegiatan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, serta laporan kinerja (Renja, Perjanjian Kinerja, LKjIP, dan laporan evaluasi), Kecamatan Wonosalam mampu meningkatkan keterpaduan antara perencanaan dan pelaksanaan kinerja. Kegiatan koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja serta reviu internal secara berkala turut berkontribusi terhadap peningkatan Nilai Evaluasi AKIP dan Reformasi Birokrasi perangkat daerah.

2. **Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan**

Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan, peningkatan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, serta pembinaan administrasi pemerintahan desa telah mendukung capaian aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Kegiatan ini berkontribusi terhadap meningkatnya Indeks Kualitas Pelayanan Publik dan kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan.

3. **Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Kegiatan koordinasi pemberdayaan masyarakat, fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan desa, serta peningkatan partisipasi lembaga kemasyarakatan menjadi faktor penting yang mendukung keberhasilan capaian aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Kegiatan-kegiatan tersebut mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan dan memperkuat sinergi antara kecamatan dan desa.

4. **Dukungan Administrasi dan Penunjang Pemerintahan**

Kegiatan administrasi keuangan, administrasi umum, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana, serta penyediaan jasa penunjang pemerintahan telah memastikan kelancaran operasional perangkat daerah. Ketersediaan dukungan administratif yang memadai menjadi fondasi penting bagi tercapainya kinerja pada berbagai aspek pemerintahan kecamatan.

3.2 Realisasi Anggaran

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Wonosalam Tahun 2025 sesuai Renstra 2025-2029, bahwa untuk mencapai sasaran ditetapkan 6 (enam) indikator kinerja yang dalam pelaksanaannya didukung oleh 6 Program, 12 kegiatan, dan 26 sub kegiatan

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut maka dibutuhkan anggaran yang merupakan input dari terlaksananya kegiatan dimaksud dan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja. Pada tahun 2025 ini Kecamatan Wonosalam mendapatkan anggaran

sebesar Rp. 3.170.214.162,- dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 2.765.001.295,- atau serapan dana APBD mencapai 87,22% sehingga dapat diketahui pada tahun 2025 kondisi anggaran silpa Rp. 405.212.867,- Selanjutnya ditampilkan alokasi anggaran yang menunjang pencapaian sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 3.14
Alokasi Per Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan/Sasaran	No.	Indikator	Capaian PK 2025 (%)	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	Capaian Anggaran 2025 (%)
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	101.98	2.647.272.844,70	2.480.464.959	93.69
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	105.90	329,728,500	329,593,375/	99.95
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	2.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	106.07	2.317.544.344,70	2.150.871.584	92.80

Selanjutnya secara rinci pencapaian kinerja dan anggaran sasaran adalah sebagai berikut:

3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran

Perbandingan capaian realisasi kinerja dengan realisasi anggaran tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Tar get	Realisasi	Capaian %	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan		Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	75	76,49	101.98			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Wonosalam	8,80	9.32	105.90	329,728,500	329,593,375/	99.95
	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	73.75	78.23	106.07	2.317.544.344,70	2.150.871.584	92.80

RATA –RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN	104.65	2.647.272.844,70	2.480.464.959	93.69
---	--------	------------------	---------------	-------

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa secara umum terdapat efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Strategis guna mencapai tujuan perangkat daerah “Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan” dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja organisasi, yakni melalui penyerapan anggaran kinerja sebesar 93.69% telah menghasilkan kinerja sebesar 104,65 dari target sebesar 100% terjadi efisiensi sebesar 6.31 %

Secara rinci pencapaian kinerja program dan anggaran Kecamatan Wonosalam tersaji dalam tabel berikut ini:

TABEL 3.16
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN
KECAMATAN WONOSALAM TAHUN 2025

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	74.01	71.23	96.24	2.317.544.344,70	2.150.871.584,00	92.80
Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	76	83	109.21	10.675.000,00	10.675.000,00	100.00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	75	58	77.33	167.029.500,00	166.980.000,00	99.97
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum	49.50	57	115.15	16.934.000,00	16.934.000,00	100,00
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	75	38	50.66	11.715.000,00	11.715.000,00	100.00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	75	88	117.33	123.375.000,00	123.289.375,00	99.93

RATA -RATA PENCAPAIAN KINERJA KEGIATAN DAN ANGGARAN	94.32			93.69
		2.647.272.844,70		2.480.464.959,0

3.2.2 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kecamatan Wonosalam sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan kinerjanya terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui peningkatan pelayanan dari seluruh aspek kepada masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian Tujuan yang ditetapkan dalam Dokumen RPD tahun 2024-2026 untuk kinerja selama tribulan 1 samapai 3 dan berdasarkan Renstra 2025-2029 untuk kinerja tribulan 4 dan tahunan.

Pemenuhan dan penggunaan sumberdaya berkaitan dengan sumber dana (anggaran). Dalam pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Kecamatan Wonosalam melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumberdaya maupun sumberdana.

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Kecamatan Wonosalam langsung memberi tanggungjawab kepada seksi yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut berusaha dengan mengedepankan prinsip:

a. **Transparan**

Membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi utamanya bidang pelayanan secara benar, dan tidak diskriminatif dengan tetap berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

b. **Responsif**

Dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi.

c. **Efisien**

Dalam pelaksanaan tugas mengarah kepada penggunaan sumberdaya yang dimiliki agar dapat memberikan hasil yang maksimal kepada publik.

d. **Efektif**

Merupakan kemampuan mencapai target berdasarkan sumberdaya yang ada dengan cara atau proses yang paling optimal.

e. Akuntabel

Bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

f. Terukur

Yakni penetapan target kinerja yang akan dicapai berikut cara untuk mencapainya.

Selanjutnya analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (anggaran), Kecamatan Wonosalam melaksanakan setiap kinerjanya dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja (output dan outcome) yang tercapai sesuai target. Prinsip efisien terlihat dari adanya penghematan serta penyesuaian anggaran pada beberapa kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi output atau outcome yang dihasilkan. Selengkapnya tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.17
Efisiensi Penggunaan Anggaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Wonosalam	105.90	99,95	5.95
2.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	106.67	92.80	13.87
TOTAL EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA ANGGARAN			106,28	96.37	9.91

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian rata - kinerja yang melebihi target yaitu sebesar 106.28% dengan menggunakan anggaran sebesar 96.37% jadi telah terjadi efisiensi anggaran sebesar 9.91 % (selisih antara capaian kinerja-anggaran). Dengan penerapan prinsip efisien dalam penggunaan anggaran akan tetapi mampu menghasilkan kinerja yang maksimal.

Tabel 3.18
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2025			SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2025			EFISIENSI SDM
		TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	KEBUTUHAN SDM (ABK)	KETERSEDIAAN SDM	% KETERSEDIAAN SDM	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Wonosalam	8.05	9.32	115.77	39	6	15.38%	84.62
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	74.05	76.23	100.98	21	5	23.80%	76.20
RATA - RATA CAPAIAN IKU				106.28%	RATA-RATA KETERSEDIAAN SDM		19.59%	80.41%

Dari tabel 3.18 dapat disimpulkan bahwa telah terdapat efisiensi sumber daya manusia sebesar 80.41 dimana dari 60 anjab ABK Kecamatan Wonosalam ketersediaan SDM adalah 11 dengan persentase ketersediaan 19.59% dengan keterbatasan SDM mampu mencapai kinerja melebihi target yaitu 106.28%.

Selanjutnya yaitu terkait adanya efisiensi terhadap penggunaan sumberdaya berupa sarana dan prasarana kantor. Dari table Rencana kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) seperti dibawah ini :

Tabel 3.19

Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tahun 2025

NO	URAIAN	HASIL REKON 2023	RKBMD 2024				JUM LAH 8 =3+4 -5-6- 7	RKBMD 2025		
			PENGADA AN	PENGHAPUSA N	PEMINDAH TANGANA N	PEMAN FAATA N		PEM ELIH ARA AN	STAND AR KEBUT UHAN	PENGADAA N
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	0	0	0	0	1	1	1	0
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	0	0	0	0	1	1	1	0
3	Tanah Lapangan Sepak Bola	1	0	0	0	0	1	1	1	0
4	Portable Generating Set	1	0	0	0	0	1	1	1	0
5	Station Wagon	1	0	0	0	0	1	1	1	0
6	Sepeda Motor	1	0	0	0	0	1	1	1	0
7	Sepeda Motor	1	0	0	0	0	1	1	1	0
8	Sepeda Motor	1	0	0	0	0	1	1	1	0
9	Sepeda Motor	1	0	0	0	0	1	1	1	0
10	Sepeda Motor	1	0	0	0	0	1	1	1	0
11	Sepeda Motor	1	0	0	0	0	1	1	1	0
12	Sepeda Motor	1	0	0	0	0	1	1	1	0
13	Sepeda Motor	1	0	0	0	0	1	1	1	0
14	Sepeda Motor	1	0	0	0	0	1	1	1	0
15	Sepeda Motor	1	0	0	0	0	1	1	1	0
16	Sepeda Motor	1	0	0	0	0	1	1	1	0
17	Sepeda Motor	1	0	0	0	0	1	1	1	0
18	Sepeda Motor	1	0	0	0	0	1	1	1	0
19	Sepeda Motor	1	0	0	0	0	1	1	1	0
20	Sepeda Motor	1	0	0	0	0	1	1	1	0
21	Sepeda Motor	1	0	0	0	0	1	1	1	0
22	Sepeda Motor	1	0	0	0	0	1	1	1	0
23	Sepeda Motor	1	0	0	0	0	1	1	1	0

24	Sepeda Motor	1	0	0	0	0	1	1	1	0
25	Sepeda Motor	1	0	0	0	0	1	1	1	0
26	Sepeda Motor	1	0	0	0	0	1	1	1	0
27	Sepeda Motor	1	0	0	0	0	1	1	1	0
28	Sepeda Motor	1	0	0	0	0	1	1	1	0
29	Sepeda Motor	1	0	0	0	0	1	1	1	0
30	Sepeda Motor	1	0	0	0	0	1	1	1	0
31	Scanner (Universal Tester)	1	0	0	0	0	1	1	1	0
32	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	1	0	0	0	0	1	1	1	0
33	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	1	0	0	0	0	1	1	1	0
34	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	1	0	0	0	0	1	1	1	0
35	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	1	0	0	0	0	1	1	1	0
36	Lemari Kayu	2	0	0	0	0	2	2	1	0
37	Lemari Kayu	2	0	0	0	0	2	2	1	0
38	Lemari Kayu	1	0	0	0	0	1	1	1	0
39	Lemari Kayu	1	0	0	0	0	1	1	1	0
40	Lemari Kayu	1	0	0	0	0	1	1	1	0
41	Rak Kayu	1	0	0	0	0	1	1	1	0
42	Rak Kayu	1	0	0	0	0	1	1	1	0
43	Rak Kayu	1	0	0	0	0	1	1	1	0
44	Rak Kayu	2	0	0	0	0	2	0	1	0
45	Rak Kayu	1	0	0	0	0	1	2	1	0
46	Filing Cabinet Besi	2	0	0	0	0	2	2	1	0
47	Filing Cabinet Besi	1	0	0	0	0	1	1	1	0
48	Filing Cabinet Besi	1	0	0	0	0	1	1	1	0
49	Filing Cabinet Besi	1	0	0	0	0	1	1	1	0
50	Filing Cabinet Besi	2	0	0	0	0	2	2	1	0
51	Lemari Kaca	1	0	0	0	0	1	1	1	0
52	Papan Visual/Papan Nama	1	0	0	0	0	1	1	1	0
53	Papan Visual/Papan Nama	1	0	0	0	0	1	1	1	0
54	White Board	1	0	0	0	0	1	1	1	0
55	Peta	1	0	0	0	0	1	1	1	0
56	Alat Penghancur Kertas	1	0	0	0	0	1	1	1	0
57	Mesin Absensi	1	0	0	0	0	1	1	1	0
58	Papan Nama Instansi	1	0	0	0	0	1	1	1	0
59	Papan Pengumuman	1	0	0	0	0	1	1	1	0
60	Papan Tulis	1	0	0	0	0	1	1	1	0
61	Meja Kerja Kayu	4	0	0	0	0	4	4	1	0
62	Kursi Besi/Metal	7	0	0	0	0	7	7	1	0
63	Kursi Kayu	3	0	0	0	0	3	3	1	0
64	Kursi Kayu	5	0	0	0	0	5	5	1	0
65	Sice	2	0	0	0	0	2	2	1	0
66	Sice	1	0	0	0	0	1	1	1	0
67	Meja Rapat	1	0	0	0	0	1	1	1	0
68	Meja Rapat	10	0	0	0	0	10	10	1	0
69	Tempat Tidur Kayu	1	0	0	0	0	1	1	1	0

70	Meja Ketik	1	0	0	0	0	1	1	1	0
71	Meja Panjang	1	0	0	0	0	1	1	1	0
72	Meja 1/2 Biro	2	0	0	0	0	2	2	1	0
73	Meja 1/2 Biro	4	0	0	0	0	4	5	1	0
74	Meja 1/2 Biro	5	0	0	0	0	5	5	1	0
75	Meja 1/2 Biro	1	0	0	0	0	1	1	1	0
76	Meja 1/2 Biro	2	0	0	0	0	2	2	1	0
77	Meja 1/2 Biro	1	0	0	0	0	1	1	1	0
78	Sketsel	17	0	0	0	0	17	17	1	0
79	Kursi Rapat	35	0	0	0	0	35	35	1	0
80	Kursi Rapat	60	0	0	0	0	60	1	1	0
81	Kursi Tamu	1	0	0	0	0	1	1	1	0
82	Kursi Putar	1	0	0	0	0	1	1	1	0
83	Kursi Putar	4	0	0	0	0	4	4	1	0
84	Kursi Putar	1	0	0	0	0	1	1	1	0
85	Kursi Putar	5	0	0	0	0	5	5	1	0
86	Kursi Putar	5	0	0	0	0	5	5	1	0
87	Kursi Biasa	14	0	0	0	0	14	14	1	0
88	Kursi Biasa	40	0	0	0	0	40	40	1	0
89	Kursi Biasa	1	0	0	0	0	1	1	1	0
90	Bangku Tunggu	2	0	0	0	0	2	2	1	0
91	Bangku Tunggu	2	0	0	0	0	2	2	1	0
92	Kursi Lipat	50	0	0	0	0	50	50	1	0
93	Meja Komputer	2	0	0	0	0	2	1	1	0
94	Meja Komputer	1	0	0	0	0	1	1	1	0
95	Sofa	1	0	0	0	0	1	1	1	0
96	Meubeleur lainnya	1	0	0	0	0	1	1	1	0
97	A.C. Split	1	0	0	0	0	1	1	1	0
98	A.C. Split	1	0	0	0	0	1	1	1	0
99	A.C. Split	1	0	0	0	0	1	1	1	0
100	Kipas Angin	3	0	0	0	0	3	3	1	0
101	Kompas Gas (Alat Dapur)	1	0	0	0	0	1	1	1	0
102	Televisi	1	0	0	0	0	1	1	1	0
103	Televisi	1	0	0	0	0	1	1	1	0
104	Amplifier	1	0	0	0	0	1	1	1	0
105	Sound System	1	0	0	0	0	1	1	1	0
106	Stabilisator	1	0	0	0	0	1	1	1	0
107	Lambang Garuda Pancasila	2	0	0	0	0	2	2	1	0
108	Gambar Presiden/Wakil Presiden	2	0	0	0	0	2	2	1	0
109	Lambang Korpri/Dharma Wanita	1	0	0	0	0	1	1	1	0
110	Gordyin/Kray	1	0	0	0	0	1	1	1	0
111	Alat Pemadam/Portable	3	0	0	0	0	3	3	1	0
112	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	0	0	0	0	1	1	1	0
113	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	0	0	0	0	1	1	1	0
114	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	0	0	0	0	1	1	1	0
115	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	0	0	0	0	1	1	1	0
116	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	0	0	0	0	1	1	1	0
117	Telephone Hybrid	1	0	0	0	0	1	1	1	0

118	Layar Film/Projector	1	0	0	0	0	1	1	1	0
119	Layar Film/Projector	1	0	0	0	0	1	1	1	0
120	Bendera Merah Putih	1	0	0	0	0	1	1	1	0
121	P.C Unit	1	0	0	0	0	1	1	1	0
122	P.C Unit	2	0	0	0	0	2	2	1	0
123	P.C Unit	1	0	0	0	0	1	1	1	0
124	P.C Unit	1	0	0	0	0	1	1	1	0
125	P.C Unit	1	0	0	0	0	1	1	1	0
126	P.C Unit	1	0	0	0	0	1	1	1	0
127	P.C Unit	1	0	0	0	0	1	1	1	0
128	P.C Unit	1	0	0	0	0	1	1	1	0
129	Lap Top	1	0	0	0	0	1	1	1	0
130	Lap Top	1	0	0	0	0	1	1	1	0
131	Lap Top	1	0	0	0	0	1	1	1	0
132	Lap Top	1	0	0	0	0	1	1	1	0
133	Lap Top	1	0	0	0	0	1	1	1	0
134	Lap Top	1	0	0	0	0	1	1	1	0
135	Note Book	1	0	0	0	0	1	1	1	0
136	Note Book	1	0	0	0	0	1	1	1	0
137	Note Book	1	0	0	0	0	1	1	1	0
138	CPU (Peralatan Mainframe)	1	0	0	0	0	1	0	1	0
139	Monitor	1	0	0	0	0	1	1	1	0
140	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	0	0	0	0	1	1	1	0
141	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	0	0	0	0	1	1	1	0
142	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	0	0	0	0	1	1	1	0
143	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	0	0	0	0	1	1	1	0
144	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	0	0	0	0	1	1	1	0
145	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	0	0	0	0	1	1	1	0
146	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	0	0	0	0	1	1	1	0
147	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	0	0	0	0	1	1	1	0
148	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	0	0	0	0	1	1	1	0
149	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	0	0	0	0	1	1	1	0
150	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	0	0	0	0	1	1	1	0
151	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	0	0	0	0	1	1	1	0
152	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	0	0	0	0	1	1	1	0
153	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	0	0	0	0	1	1	1	0
154	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	0	0	0	0	1	1	1	0
155	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	0	0	0	0	1	1	1	0
156	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	0	0	0	0	1	1	1	0
157	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	0	0	0	0	2	2	1	0
158	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	0	0	0	0	1	1	1	0
159	Netware Interface External	1	0	0	0	0	1	1	1	0
160	Peralatan Komputer lainnya	1	0	0	0	0	1	1	1	0
161	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	0	0	0	0	1	1	1	0
162	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	0	0	0	0	1	1	1	0

163	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	0	0	0	0	1	1	1	0
164	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	0	0	0	0	1	1	1	0
165	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	0	0	0	0	1	1	1	0
166	Gedung Pos Jaga Permanen	1	0	0	0	0	1	1	1	0
167	Rumah Negara Golongan I Tipe A Semi Permanen	1	0	0	0	0	1	1	1	0
168	Instansi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	1	0	0	0	0	1	1	1	0
169	Peta Lokasi	1	0	0	0	0	1	1	1	0
170	Tugu Tanda Batas Administrasi Kec.	1	0	0	0	0	1	1	1	0
171	Pagar Permanen /Pekarangan	1	0	0	0	0	1	1	1	0
172	Printer	0	0	0	0	0	0	0	1	0
173	Meja Kursi tamu	0	0	0	0	0	0	0	2	0
174	Laptop	0	0	0	0	0	0	0	1	0
175	Runingtex	0	0	0	0	0	0	0	1	0
176	Lampu hias	0	0	0	0	0	0	0	1	0
177	Neon Box	0	0	0	0	0	0	0	1	0
178	AC	0	0	0	0	0	0	0	3	0
179	Tandon Air + Tower	0	0	0	0	0	0	0	1	0
180	Meja Prasmanan	0	0	0	0	0	0	0	3	0
181	Meja Rapat	0	0	0	0	0	0	0	1	0
182	Tangga Alumunium	0	0	0	0	0	0	0	1	0
183	Fakum Cleaner	0	0	0	0	0	0	0	1	0
184	Proyektor	0	0	0	0	0	0	0	1	0
185	Kipas Angin	0	0	0	0	0	0	0	4	4
186	Kursi Rapat	0	0	0	0	0	0	0	50	50
187	Filing Cabinet Besi	0	0	0	0	0	0	0	6	6
188	Rak arsip besi	0	0	0	0	0	0	0	3	3
189	Sanyo	0	0	0	0	0	0	0	1	1
190	Ac	0	0	0	0	0	0	0	8	8
191	Dispenser	0	0	0	0	0	0	0	2	2

Dari tabel diatas dapat disimpulkan untuk efisiensi atas penggunaan sumber daya sarana dan prasarana adalah sebagai berikut :

Tabel 3.20
Efisiensi Sarana dan Prasarana

NO	URAIAN	HASIL REKON 2025	STANDAR KEBUTUHAN	EFISIENSI
1	2	3	4	5
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	2	0

2	Tanah Lapangan Sepak Bola	1	1	0
3	Portable Generating Set	1	1	0
4	Pompa Air	1	1	0
5	Station Wagon	1	1	0
6	Sepeda Motor	10	10	0
7	Gergaji Chain Saw	2	2	0
8	Lemari Kayu	8	8	0
9	Rak Kayu	0	0	0
10	Filing Cabinet Besi	9	9	0
11	Lemari Kaca	1	1	0
12	CCTV - Camera Control Television System	6	6	0
13	Papan Visual/Papan Nama	3	3	0
14	White Board	1	1	0
15	Alat Penghancur Kertas	1	1	0
16	Mesin Absensi	1	1	0
17	LCD Projector/Infocus	1	1	0
18	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	1	0
19	Mesin Antrian	1	1	0
20	Alat Kantor Lainnya	1	1	0
21	Meja Kerja Kayu	6	6	0
22	Kursi Kayu	0	0	0
23	Sice	3	3	0
24	Meja Rapat	13	13	0
25	Tempat Tidur Kayu	1	1	0

26	Meja Ketik	1	1	0
27	Meja Panjang	1	1	0
28	Meja 1/2 Biro	8	8	0
29	Sketsel	17	17	0
30	Kursi Rapat	116	116	0
31	Kursi Tamu	1	1	0
32	Kursi Putar	15	15	0
33	Kursi Biasa	11	11	0
34	Bangku Tunggu	4	4	0
35	Kursi Lipat	0	0	0
36	Meja Komputer	3	3	0
37	Sofa	1	1	0
38	Meubeleur lainnya	2	2	0
39	Mesin Pemotong Rumput	2	2	0
40	Lemari Es	1	1	0
41	A.C. Split	6	6	0
42	Televisi	3	3	0
43	Sound System	1	1	0
44	Unit Power Supply	1	1	0
45	Lambang Garuda Pancasila	2	2	0
46	Tangga Aluminium	2	2	0
47	Gordyin/Kray	1	1	0
48	Alat Pemadam/Portable	3	3	0
49	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	1	0

50	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	1	0
51	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	2	0
52	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	1	0
53	Kursi Kerja Pejabat lainnya	5	5	0
54	Kursi Rapat Pejabat lainnya	6	6	0
55	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2	2	0
56	Microphone/Wireless MIC	2	2	0
57	Professional Sound System	1	1	0
58	Digital LED Running Text	1	1	0
59	Layar Film/Projector	1	1	0
60	Camera Digital	2	2	0
61	Unit Tranceiver UHF Portable	4	4	0
62	Kursi Dorong	1	1	0
63	Bendera Merah Putih	1	1	0
64	P.C Unit	8	8	0
65	Lap Top	10	12	2
66	Komputer Unit Lainnya	1	3	2
67	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12	12	0
68	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3	3	0
69	External/ Portable Hardisk	2	2	0
70	Netware Interface External	1	1	0
71	Peralatan Komputer lainnya	1	1	0
72	Alat Tennis Meja	1	1	0
73	Peralatan Permainan lainnya	1	1	0

74	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4	4	0
75	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	1	0
76	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	1	0
77	Gedung Pos Jaga Permanen	1	1	0
78	Bangunan Lantai Jemur Lain-lain (dst)	1	1	0
79	Rumah Negara Golongan I Tipe A Semi Permanen	1	1	0
80	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kecamatan	1	1	0
81	Pagar Permanen	1	1	0
82	Jalan Khusus Pejalan Kaki (Trotoar)	1	1	0
83	Instansi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	1	1	0
84	Peta Lokasi	0	0	0
85	Maket & Foto Dokumen Lain-lain	0	0	0
86	Drone	1	2	1
87	Kamera ZOOM	0	1	1
JUMLAH		362	368	6

Sumber Hasil Rekonsiliasi Tahun 2025 dan RKBMD tahun 2027

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari hasil rekonsiliasi BMD tahun 2025 terdapat 362 sarana dan prasarana di Kecamatan Wonosalam sedangkan hasil analisis standar kebutuhan adalah 368 sarana prasarana jadi untuk tingkat efisiensi dalam pencapaian kinerja adalah 6.

3.3. Inovasi dan Penghargaan

3.3.1. Inovasi WELAS (Wonosalam Empati Lansia dan Disabilitas)

Dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Wonosalam melalui peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dikembangkan inovasi **WELAS**.

Inovasi ini dilatarbelakangi oleh Banyak lansia dan penyandang disabilitas menghadapi kendala dalam mengakses layanan publik dan bantuan sosial secara langsung. Hal ini mendorong pemerintah kecamatan untuk menciptakan inovasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan ini. *WELAS* dibuat untuk menjembatani kesenjangan layanan dan membuat layanan menjadi lebih ramah lansia & disabilitas. Selain itu Kecamatan Wonosalam ingin memastikan bahwa layanan administrasi Pemerintah Kecamatan dapat dijangkau tanpa hambatan fisik maupun birokrasi oleh seluruh warga, termasuk mereka yang rentan. Inovasi ini juga bertujuan untuk mengurangi hambatan sosial dan administratif selama mendapatkan layanan resmi.

Dengan inovasi tersebut diharapkan :

1. Meningkatkan Akses Pelayanan Publik

Inovasi WELAS mempermudah lansia dan penyandang disabilitas dalam mengakses pelayanan administrasi dan sosial di Kecamatan Wonosalam tanpa harus mengalami hambatan fisik, mobilitas, maupun prosedur yang rumit.

2. Memberikan Pelayanan yang Lebih Ramah dan Humanis

Melalui pendekatan empati dan kepedulian, pelayanan kepada kelompok rentan menjadi lebih personal, sopan, dan memperhatikan kondisi fisik serta psikologis penerima layanan.

3. Mengurangi Ketergantungan terhadap Pihak Lain

Dengan layanan jemput bola dan pendampingan, lansia dan penyandang disabilitas tidak selalu bergantung pada keluarga atau pihak lain untuk mengurus keperluan administrasi dan pelayanan pemerintah.

4. Meningkatkan Perlindungan Sosial

Inovasi WELAS membantu memastikan lansia dan penyandang disabilitas tercatat, terdata, dan mendapatkan hak-haknya, seperti akses bantuan sosial, layanan kesehatan, dan program pemerintah lainnya.

5. Mendorong Pelayanan Publik yang Inklusif

WELAS mewujudkan pelayanan publik yang adil dan setara, tanpa diskriminasi, sehingga seluruh masyarakat Wonosalam dapat merasakan kehadiran pemerintah secara nyata.

6. Meningkatkan Kepuasan dan Kepercayaan Masyarakat

Pelayanan yang cepat, tepat, dan berpihak pada masyarakat rentan berdampak pada meningkatnya kepuasan serta kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kecamatan Wonosalam.

7. Mendukung Kesejahteraan dan Kualitas Hidup

Dengan terpenuhinya kebutuhan administrasi dan sosial, lansia dan penyandang disabilitas dapat hidup lebih tenang, mandiri, dan bermartabat.

3.3.2. Penghargaan

Berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dilakukan oleh Tim Evaluator Kabupaten Jombang, Kecamatan Wonosalam memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 99.74 dengan kategori A (Sangat Baik). Capaian nilai tersebut menempatkan Kecamatan Wonosalam sebagai Perangkat Daerah dengan **Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terbaik ke 1 Tahun 2025**.

Penilaian capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Wonosalam dilaksanakan berdasarkan pedoman **PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017** tentang Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Pengukuran IKM dilakukan terhadap masyarakat pengguna layanan dengan menilai sembilan unsur pelayanan, meliputi persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk layanan, kompetensi dan perilaku pelaksana, sarana prasarana, serta penanganan pengaduan. Hasil penilaian IKM digunakan sebagai instrumen evaluasi kinerja pelayanan publik dan dasar perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pelayanan di Kecamatan Wonosalam.

Selain capaian Indeks Kepuasan Masyarakat, Kecamatan Wonosalam juga memperoleh pengakuan kinerja melalui Penilaian Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (IKKK) Tahun 2025. Berdasarkan hasil penilaian resmi Pemerintah Kabupaten Jombang, Kecamatan Wonosalam memperoleh nilai IKKK sebesar 76,49 dan menempati peringkat Terbaik ke-3 dari seluruh kecamatan di Kabupaten Jombang. Penilaian IKKK ini merepresentasikan

kinerja kecamatan secara menyeluruh berdasarkan enam aspek tugas kewilayahan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Capaian sebagai Kecamatan dengan Reformasi Birokrasi terbaik serta peringkat tinggi dalam Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan menunjukkan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan, akuntabilitas kinerja, serta inovasi pelayanan publik yang dilaksanakan Kecamatan Wonosalam telah memberikan hasil yang nyata dan terukur. Capaian tersebut menjadi dasar untuk menjaga konsistensi kinerja sekaligus mendorong perbaikan berkelanjutan pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik pada periode berikutnya.

3.4 Upaya Perbaikan Kinerja

a. Upaya Perbaikan

1. Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian tujuan **“Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan”** adalah:

- Menyusun dan menetapkan SK Tim Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Binwas Desa) di tingkat kecamatan.
- Menyusun rencana kerja Binwas Desa yang terstruktur dan terdokumentasi, meliputi pembinaan RKPDes, APBDes, pertanggungjawaban APBDes, BUMDes, fasilitasi Raperdes, penatausahaan aset desa, dan profil desa.
- Meningkatkan pendampingan dan pembinaan aparatur desa secara berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas tata kelola pemerintahan desa.
- Memperkuat monitoring dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan desa.
- Mengintensifkan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pembinaan wawasan kebangsaan serta ketahanan nasional yang dilaksanakan oleh kecamatan.
- Melengkapi dokumen pendukung kegiatan (undangan, daftar hadir, notulen, rekomendasi, dan laporan kegiatan) secara tertib dan konsisten.
- Mengoptimalkan pelaksanaan dialog dan koordinasi melalui forum kewilayahan, seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam).

- Melaksanakan fasilitasi pertemuan rutin Forkopimcam secara triwulanan dengan tindak lanjut hasil rapat yang terukur.
 - Mendorong dan memfasilitasi pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) secara bertahap, mengingat masih terbatasnya desa yang telah membentuk Destana.
 - Memperkuat koordinasi dengan FKDM, pemerintah desa, dan unsur terkait dalam deteksi dini dan pencegahan konflik sosial.
 - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban lingkungan melalui pendekatan persuasif dan pembinaan
2. Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk **“Meningkatkan kualitas pelayanan publik”** meliputi:
- Menyusun dan melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) secara berkala dengan fokus pada reviu dan penyempurnaan standar pelayanan.
 - Meningkatkan publikasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui media informasi yang mudah diakses masyarakat.
 - Memperkuat tindak lanjut hasil SKM dan IKM secara konsisten dan terdokumentasi.
 - Mempercepat waktu penyelesaian pelayanan, khususnya pada layanan yang masih dirasakan lambat oleh masyarakat.
 - Menyediakan dan mensosialisasikan Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana Pelayanan kepada seluruh petugas layanan.
 - Menerapkan reward dan punishment bagi petugas pelayanan untuk meningkatkan motivasi dan disiplin kerja.
 - Melengkapi sarana dan prasarana pelayanan, termasuk fasilitas bagi kelompok rentan, tempat parkir, serta sarana konsultasi dan pengaduan tatap muka.
3. Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mendukung **“Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif”** adalah:
- Terus meningkatkan kualitas rencana aksi melalui perumusan rencana aksi yang efektif, efisien dan inovatif berdasarkan permasalahan riil yang dihadapi serta dengan mempertimbangkan hasil evaluasi ini, pastikan bahwa indikator rencana aksi telah menggambarkan hasil/perubahan agar cukup untuk mengungkit ketercapaian target Indikator pembangunan RB PD.

- Menyempurnakan proses Monev Internal dimana evaluasi dilakukan dengan maksud menghasilkan
- Mengevaluasi catatan dan rencana tindaklanjut secara berkelanjutan, rencana tindaklanjut diwujudkan dengan penambahan/perubahan rencana aksi untuk dilaksanakan pada periode/tribulan berikutnya
- Meningkatkan dan penguatan komitmen pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada seluruh pegawaikhususnya Tim RB PD sehingga Reformasi Birokrasi bukan hanya kegiatan administratif namun menjadi bagian dari perubahan tata kelola secara substantif untuk memaksimalkan kinerja organisasi dan memberikan dampak/outcome yang dapat dirasakan oleh masyarakat
- Melakukan penguatan dan perbaikan program pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan berdasarkan isu strategis atau permasalahanpermasalahan yang dihadapi serta catatan dan rekomendasi
- Melakukan upaya peningkatan implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di tingkat Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan dan berkoordinasi dengan Tim SPIP Kabupaten.
- Memperbaiki ketepatan waktu penilaian SKP dengan memperhatikan jadwal dan tahapan yang telah ditentukan agar proses pengelolaan kinerja berjalan lebih efektif.
- Peningkatan Kembali kompetensi/diklat bagi masing-masing ASN untuk penilaian tahun berikutnya.
- Penguatan dalam mekanisme kerja dan manajemen kinerja untuk dievaluasi secara berkelanjutan dan diberikan feedback perilaku kerja agar nilai berAKHLAK melekat pada cara kerja, bukan hanya slogan dan tertera dalam dokumen administratif.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kecamatan mempunyai posisi yang strategis dalam pelaksanaan tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan Wonosalam berdasarkan tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen RPD 2024-2026 dan Renstra 2025-2029 Kecamatan Wonosalam. Laporan kinerja Kecamatan Wonosalam Tahun 2024 memaparkan keberhasilan serta analisa program/kegiatan yang menunjang maupun hambatan dalam proses pencapaian pelaksanaan sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2025 beserta perubahannya. Capaian Kinerja tersebut dijabarkan dalam indikator kinerja yang diuraikan dari sasaran dan tujuan Kecamatan Wonosalam.

Selama Tahun 2025 melalui target pada Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai, peran Kecamatan terlihat melalui Tujuan Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan” dan Sasaran Strategis yakni “Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif” dan “Meningkatnya Kualitas Layanan Publik” dengan capaian kinerja sebesar 104,33% dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi IKKK ditargetkan 75 telah tercapai 71,02 dengan tingkat capaian 94,69% berdasarkan hasil LHE IKKK Nomor : 100.2.2.4/89/415.10/2026 tanggal 06 Januari 2026. Terkait dengan hasil nilai Evaluasi IKKK tahun 2025 masih terdapat beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan diantaranya adalah meningkatkan nilai pada masing-masing aspek yang menunjang perolehan nilai IKKK.
2. Nilai IKPP kecamatan Wonosalam pada Tahun 2024 ditargetkan 7,9 namun baru tercapai 8,96 atau dengan capaian 113,42%. Nilai IKPP adalah akumulasi dari perhitungan antara nilai IKM dan IPP. Pada tahun 2025 nilai IKM kecamatan Wonosalam adalah 98,74 dan nilai IPP adalah 4,02. Meski target telah tercapai namun Kecamatan Wonosalam tetap berkomitmen untuk terus dan konsisten berupaya meningkatkan mutu pelayanan serta standart komponen pemenuhan nilai IKM dan IPP agar pada tahun -tahun berikutnya bisa terus meningkat. Diantaranya yang perlu di tingkatkan yaitu akan dilakukan perbaikan pada unsur sarana dan prasarana dan

kompetensi petugas berdasarkan Permenpanrb No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik.

3. Nilai IRB Kecamatan Wonosalam tahun 2025 berhasil tercapai 78.65 dari target 75 atau dengan presentase capaian sebesar 104,87%. Nilai IRB adalah akumulasi dari 2 komponen RB yaitu capaian strategis pelaksanaan RB serta nilai dari 20 indikator RB lainnya. Sehingga dengan tercapainya target IRB tahun 2025 membuktikan bahwa telah adanya kolaborasi dari semua pegawai serta dukungan pimpinan yang mampu memberikan dukungan serta dorongan untuk mencapai target kinerja bersama-sama.

4.1 Kesimpulan

Pencapaian tersebut diperoleh melalui proses dan mekanisme yang baik, mulai dari perencanaan, pengukuran kinerja sampai dengan evaluasi secara menyeluruh terhadap hasil yang telah dicapai. Dan sesuai dengan periodisasi RPD serta awal periodisasi Renstra 2025-2029 yang berakhir pada Tahun 2029 mendatang, maka masih tetap menghadapi tantangan untuk dapat mencapai target akhir pada periode Renstra 2025-2029.

Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Kecamatan Wonosalam untuk lebih meningkatkan kinerja adalah:

1. Dalam rangka peningkatan nilai IKKK pada tahun berikutnya hal yang bias dilakukan oleh kecamatan Wonosalam adalah dengan memaksimalkan pada pencapaian nilai aspek pada masing-masing program yang telah ditetapkan. Dengan tercapainya semua nilai aspek Program yang notabenehnya adalah bagian dari kinerja semua kasi pada kecamatan, maka hal yang utama adalah meningkatkan kinerja pada semua aspek di Kecamatan dengan sinergi yang baik antara semua pegawai, pimpinan dan juga intas sector yang ada di Kecamatan.
ngetahuan dan pemahaman tentang Sakip
2. Dalam rangka peningkatan nilai IKPP pada tahun berikutnya maka Kecamatan Wonosalam berupaya untuk melakukan perbaikan pada komponen penilaian IKPP yaitu :
 - Dalam rangka peningkatan nilai IKM Kecamatan Wonosalam pada tahun berikutnya akan dilakukan upaya Berdasarkan Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik terkait 9 unsur SKM akan

dilakukan perbaikan pada unsur:

1. Aspek sarana dan Prasarana, telah diusulkan alat running Text pelayanan serta peningkatan kapasitas jaringan internet yang diharapkan dapat menunjang kinerja pelayanan masyarakat.
2. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan yang masuk baik secara online maupun offline
- Dalam rangka peningkatan nilai IPP Kecamatan Wonosalam yang masih dibawah realisasi Indeks Pelayanan Publik Nasional untuk meningkat kinerja lebih baik akan dilakukan:
 1. Aspek pelayanan: SP yang ditetapkan dipublikasikan di area ruang pelayanan, media informasi, media cetak dan website/media sosial dan Maklumat Pelayanan yang ditetapkan dipublikasikan di media informasi di dalam ruangan, media sosial atau website dan area pemerintahan lainnya (baliho/billboard)
 2. Aspek Profesionalisme SDM: memberikan respon layanan secepatnya
 3. Aspek sarana dan prasarana: Menyediakan step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda, tempat parkir dan toilet khusus pengunjung Paten
3. Dalam rangka meningkatkan nilai IRB , maka hal yang perlu ditingkatkan adalah kolaborasi dari semua pegawai serta dukungan pimpinan yang mampu memberikan dukungan serta dorongan untuk mencapai target kinerja bersama-sama

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Wonosalam diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kecamatan Wonosalam kepada pihak terkait sebagai stakeholders ataupun yang telah berperan aktif dan mengambil bagian dalam pelaksanaan seluruh program pembangunan.

Wonosalam, 07 Januari 2026

CAMAT WONOSALAM

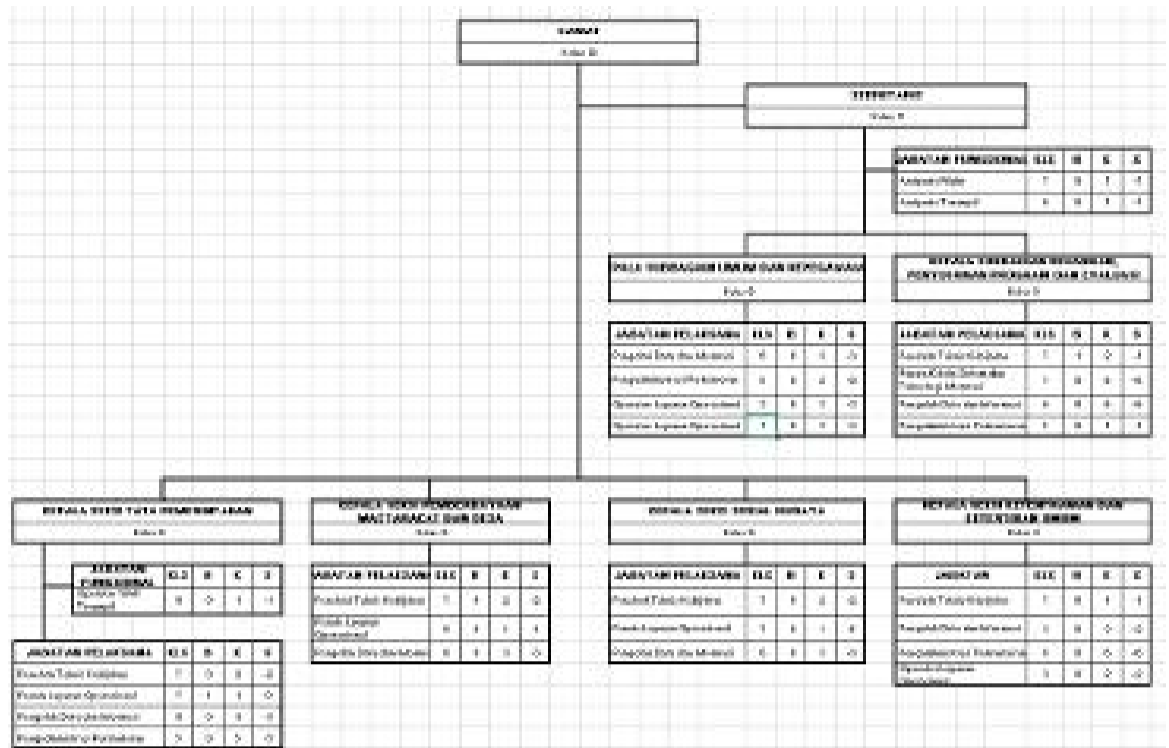


YUDHA ASMARA, S.STP., M.E

Pembina

NIP. 198003031998101001

2. Dokumen Analisa kebutuhan pegawai



4. P_RKBMD 2024

REKAM BERSI 4 APRIL 2024
KECANTAN/WORDELAM

REKAM BERSI 2024

NO	URAIAN	HASIL REKAM BERSI	MUTU MASUK TAHUN 2024	PENCAPAIAN PERSEN JAMNIB 2024	REKAM BERSI 2024					
					MELAKUKUKAN	PENYAKIT TERKUNCI	REMANFAKTIVASI	PEMERIKSAAN	STANDAR HUKUM/ETIK	PENCAPAIAN
1	1	1	4	5	6	7	8	9 = 3+6+7+8	10+4+5	11 = 10-9
1	Primer	20	2	1	6	9	8	20	14	1
2	Revisi (Terdapat)	3	2	2	2	3	2	3	5	2
3	Legenda	0	0	1	1	0	1	0	0	0
4	Legenda	0	0	1	1	0	0	0	1	1
5	Legenda	0	0	1	1	0	0	0	1	1
6	Legenda	0	0	1	1	0	0	0	1	1
7	Legenda	0	0	1	1	0	0	0	1	1
8	Legenda	0	0	1	1	0	0	0	1	1
9	Legenda	0	0	1	1	0	0	0	1	1
10	Legenda	0	0	1	1	0	0	0	1	1
11	Legenda	0	0	1	1	0	0	0	1	1
12	Legenda	0	0	1	1	0	0	0	1	1
13	Legenda	0	0	1	1	0	0	0	1	1
14	Legenda	0	0	1	1	0	0	0	1	1
15	Legenda	0	0	1	1	0	0	0	1	1
16	Legenda	0	0	1	1	0	0	0	1	1
17	Legenda	0	0	1	1	0	0	0	1	1
18	Legenda	0	0	1	1	0	0	0	1	1
19	Legenda	0	0	1	1	0	0	0	1	1
20	Legenda	0	0	1	1	0	0	0	1	1

Worodelam 2 Juli 2024
KECANTAN/WORDELAM





PEMERINTAHAN KAB. JOMBANG



KECAMATAN WONOSALAM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	2,647,272,844.70	2,480,464,959.00	93.70	2,718,963,643.00
5.1	BELANJA OPERASI	2,461,203,528.70	2,296,078,409.00	93.29	2,457,804,643.00
5.1.01	Belanja Pegawai	1,670,925,894.71	1,525,274,634.00	91.28	1,694,045,181.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	737,427,328.71	691,335,826.00	93.75	757,354,103.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	565,699,722.50	524,014,114.00	92.63	577,414,699.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	539,442,632.50	501,588,914.00	92.98	577,414,699.00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	26,257,090.00	22,425,200.00	85.41	0.00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	55,846,805.20	54,446,148.00	97.49	61,119,290.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	53,088,505.60	51,755,124.00	97.49	61,119,290.00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2,758,299.60	2,691,024.00	97.56	0.00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	77,203,000.00	75,320,000.00	97.56	75,320,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	77,203,000.00	75,320,000.00	97.56	75,320,000.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4,135,875.00	3,885,000.00	93.93	6,405,000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2,654,750.00	2,590,000.00	97.56	6,405,000.00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1,481,125.00	1,295,000.00	87.43	0.00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	28,504,512.00	27,809,280.00	97.56	30,923,340.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	26,945,671.50	26,288,460.00	97.56	30,923,340.00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1,558,840.50	1,520,820.00	97.56	0.00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1,546,747.55	1,506,611.00	97.41	1,452,302.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1,546,747.55	1,506,611.00	97.41	1,452,302.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	7,024.33	6,978.00	99.34	7,823.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	6,672.75	6,635.00	99.43	7,823.00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	351.58	343.00	97.56	0.00
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1,125,781.08	1,086,925.00	96.55	1,177,910.00
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1,060,362.50	1,033,102.00	97.43	1,177,910.00
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	65,418.58	53,823.00	82.27	0.00
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	3,357,861.05	3,260,770.00	97.11	3,533,739.00
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	3,176,987.50	3,099,308.00	97.55	3,533,739.00
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	180,873.55	161,462.00	89.27	0.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	933,498,566.00	833,938,808.00	89.33	868,208,578.00

5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	714,510,944.00	641,296,494.00	89.75	180,347,077.00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	714,510,944.00	641,296,494.00	89.75	180,347,077.00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	0.00	0.00	0.00	232,618,942.00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	0.00	0.00	0.00	232,618,942.00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	218,987,622.00	192,642,314.00	87.97	455,242,559.00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	218,987,622.00	192,642,314.00	87.97	455,242,559.00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektivitas	0.00	0.00	0.00	68,482,500.00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0.00	0.00	0.00	62,482,500.00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0.00	0.00	0.00	58,402,500.00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0.00	0.00	0.00	4,080,000.00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	790,277,633.99	770,803,775.00	97.54	763,759,462.00
5.1.02.01	Belanja Barang	278,736,034.00	277,456,875.00	99.54	205,274,060.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	270,259,134.00	269,034,075.00	99.55	191,350,060.00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	108,000.00	108,000.00	100.00	0.00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7,647,984.00	7,643,500.00	99.94	15,636,080.00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Carbon	2,126,950.00	2,056,950.00	96.71	7,429,850.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4,184,000.00	4,183,375.00	99.99	4,272,500.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6,624,250.00	6,612,250.00	99.82	9,176,675.00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk	485,950.00	485,000.00	99.80	1,319,955.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	155,112,500.00	154,835,000.00	99.82	108,535,000.00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	29,260,000.00	28,450,000.00	97.23	29,280,000.00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	7,500,000.00	7,500,000.00	100.00	0.00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	14,000,000.00	14,000,000.00	100.00	7,800,000.00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	0.00	0.00	0.00	6,600,000.00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	43,209,500.00	43,160,000.00	99.89	0.00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	0.00	0.00	0.00	1,185,000.00
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	0.00	0.00	0.00	1,185,000.00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	8,476,900.00	8,422,800.00	99.36	12,739,000.00
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	4,462,100.00	4,452,700.00	99.79	7,640,000.00
5.1.02.01.04.0119	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	1,430,400.00	1,400,000.00	97.87	0.00
5.1.02.01.04.0120	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	1,685,600.00	1,680,100.00	99.67	0.00
5.1.02.01.04.0121	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	0.00	0.00	0.00	1,545,000.00
5.1.02.01.04.0122	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	898,800.00	890,000.00	99.02	0.00
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	0.00	0.00	0.00	3,554,000.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	335,054,100.00	324,691,421.00	96.91	182,687,761.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	303,582,100.00	294,858,344.00	97.13	162,173,698.00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan	8,040,000.00	7,020,000.00	87.31	0.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, dan	2,600,000.00	2,600,000.00	100.00	9,200,000.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim	48,000,000.00	48,000,000.00	100.00	43,500,000.00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan	3,600,000.00	3,600,000.00	100.00	1,650,000.00

5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana	8,642,800.00	8,570,000.00	99.16	0.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	97,200,000.00	93,600,000.00	96.30	82,800,000.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	800,000.00	800,000.00	100.00	0.00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	0.00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	40,660,000.00	40,660,000.00	100.00	0.00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	0.00	0.00	0.00	3,360,000.00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1,800,000.00	1,110,000.00	61.67	1,006,000.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	21,000,000.00	20,918,244.00	99.61	10,424,824.00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2,352,000.00	2,100,000.00	89.29	2,100,000.00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3,600,000.00	2,622,600.00	72.85	5,132,874.00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keu	61,287,300.00	59,257,500.00	96.69	0.00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	11,952,000.00	10,313,077.00	86.29	6,454,063.00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	10,800,000.00	9,161,077.00	84.82	5,775,000.00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	504,000.00	504,000.00	100.00	247,424.50
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	648,000.00	648,000.00	100.00	431,638.50
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	9,520,000.00	9,520,000.00	100.00	3,410,000.00
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	2,520,000.00	2,520,000.00	100.00	0.00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	4,500,000.00	4,500,000.00	100.00	3,410,000.00
5.1.02.02.04.0416	Belanja Sewa Elektronik/Electric	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00	0.00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	5,000,000.00
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	5,000,000.00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis s	0.00	0.00	0.00	5,650,000.00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	0.00	0.00	0.00	5,650,000.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	120,417,500.00	119,725,416.00	99.43	323,709,800.00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	0.00	0.00	0.00	221,399,800.00
5.1.02.03.01.0017	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan	0.00	0.00	0.00	221,399,800.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	51,309,700.00	51,199,516.00	99.79	73,526,550.00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat	36,940,000.00	36,871,776.00	99.82	33,600,000.00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat	9,989,700.00	9,984,740.00	99.95	27,376,550.00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Al	0.00	0.00	0.00	1,470,000.00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Al	0.00	0.00	0.00	3,660,000.00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Al	0.00	0.00	0.00	1,580,000.00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Person	4,380,000.00	4,343,000.00	99.16	5,840,000.00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	69,107,800.00	68,525,900.00	99.16	28,783,450.00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Ged	69,107,800.00	68,525,900.00	99.16	28,783,450.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	56,069,999.99	48,930,063.00	87.27	52,087,841.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	56,069,999.99	48,930,063.00	87.27	52,087,841.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	50,069,999.99	43,130,063.00	86.14	43,095,391.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,000,000.00	5,800,000.00	96.67	8,992,450.00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	2,461,203,528.70	2,296,078,409.00	93.29	2,457,804,643.00
5.2	BELANJA MODAL	186,069,316.00	184,386,550.00	99.10	261,159,000.00

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	181,629,316.00	179,986,550.00	99.10	184,839,000.00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	1,245,000.00	1,221,000.00	98.07	0.00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	1,245,000.00	1,221,000.00	98.07	0.00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	1,245,000.00	1,221,000.00	98.07	0.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	38,587,600.00	38,247,800.00	99.12	102,055,000.00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	0.00	0.00	0.00	17,813,000.00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0.00	0.00	0.00	17,813,000.00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	15,453,600.00	15,429,000.00	99.84	63,200,000.00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	0.00	0.00	0.00	20,600,000.00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	8,779,200.00	8,769,000.00	99.88	24,330,000.00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6,674,400.00	6,660,000.00	99.78	15,170,000.00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	23,134,000.00	22,818,800.00	98.64	21,042,000.00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	7,150,000.00	7,145,600.00	99.94	0.00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	15,984,000.00	15,673,200.00	98.06	21,042,000.00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	5,746,800.00	5,683,200.00	98.89	17,030,000.00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	0.00	0.00	0.00	17,030,000.00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0.00	0.00	0.00	17,030,000.00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	5,746,800.00	5,683,200.00	98.89	0.00
5.2.02.06.02.0005	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	5,746,800.00	5,683,200.00	98.89	0.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	136,049,916.00	134,834,550.00	99.11	59,554,000.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	114,911,916.00	113,786,100.00	99.02	44,050,000.00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	114,911,916.00	113,786,100.00	99.02	24,650,000.00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0.00	0.00	0.00	19,400,000.00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	21,138,000.00	21,048,450.00	99.58	15,504,000.00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	21,138,000.00	21,048,450.00	99.58	0.00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0.00	0.00	0.00	15,504,000.00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0.00	0.00	0.00	6,200,000.00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0.00	0.00	0.00	6,200,000.00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	0.00	0.00	0.00	6,200,000.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4,440,000.00	4,400,000.00	99.10	76,320,000.00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	0.00	0.00	0.00	76,320,000.00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0.00	0.00	0.00	76,320,000.00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	0.00	0.00	0.00	76,320,000.00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	4,440,000.00	4,400,000.00	99.10	0.00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	4,440,000.00	4,400,000.00	99.10	0.00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	4,440,000.00	4,400,000.00	99.10	0.00
	JUMLAH BELANJA MODAL	186,069,316.00	184,386,550.00	99.10	261,159,000.00
	JUMLAH BELANJA	2,647,272,844.70	2,480,464,959.00	93.70	2,718,963,643.00
	SURPLUS/DEFISIT	(2,647,272,844.70)	(2,480,464,959.00)	93.70	(2,718,963,643.00)

Kab. Jombang, 13 Januari 2026
KEPALA KECAMATAN WONOSALAM



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Yudha Asmara", is written over the seal.

YUDHA ASMARA, S.STP., ME
NIP.198003031998101001



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

SKPD : KECAMATAN WONOSALAM

Tahun Anggaran : 2025

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN SKPD

(SPJ FUNGSIONAL)

Bulan : Desember

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5	BELANJA DAERAH	Rp2.647.272.844,70	Rp1.354.729.813,00	Rp170.544.821,00	Rp1.525.274.634,00	Rp483.815.550,00	Rp85.365.500,00	Rp569.181.050,00	Rp336.028.803,00	Rp49.980.472,00	Rp386.009.275,00	Rp2.480.464.959,00	Rp166.807.885,70
5.1	BELANJA OPERASI	Rp2.461.203.528,70	Rp1.354.729.813,00	Rp170.544.821,00	Rp1.525.274.634,00	Rp300.650.000,00	Rp85.365.500,00	Rp386.015.500,00	Rp334.807.803,00	Rp49.980.472,00	Rp384.788.275,00	Rp2.296.078.409,00	Rp165.125.119,70
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp1.670.925.894,71	Rp1.354.729.813,00	Rp170.544.821,00	Rp1.525.274.634,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.525.274.634,00	Rp145.651.260,71
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp790.277.633,99	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.650.000,00	Rp85.365.500,00	Rp386.015.500,00	Rp334.807.803,00	Rp49.980.472,00	Rp384.788.275,00	Rp770.803.775,00	Rp19.473.858,99
5.2	BELANJA MODAL	Rp186.069.316,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp183.165.550,00	Rp0,00	Rp183.165.550,00	Rp1.221.000,00	Rp0,00	Rp1.221.000,00	Rp184.386.550,00	Rp1.682.766,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp181.629.316,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp178.765.550,00	Rp0,00	Rp178.765.550,00	Rp1.221.000,00	Rp0,00	Rp1.221.000,00	Rp179.986.550,00	Rp1.642.766,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp4.440.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.400.000,00	Rp0,00	Rp4.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.400.000,00	Rp40.000,00
Kecamatan Wonosalam		Rp2.647.272.844,70	Rp1.354.729.813,00	Rp170.544.821,00	Rp1.525.274.634,00	Rp483.815.550,00	Rp85.365.500,00	Rp569.181.050,00	Rp336.028.803,00	Rp49.980.472,00	Rp386.009.275,00	Rp2.480.464.959,00	Rp166.807.885,70
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp2.317.544.344,70	Rp1.354.729.813,00	Rp170.544.821,00	Rp1.525.274.634,00	Rp333.680.550,00	Rp75.865.500,00	Rp409.546.050,00	Rp182.434.428,00	Rp33.616.472,00	Rp216.050.900,00	Rp2.150.871.584,00	Rp166.672.760,70
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp4.502.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.240.000,00	Rp0,00	Rp4.240.000,00	Rp4.240.000,00	Rp262.500,00
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp3.697.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.697.500,00	Rp0,00	Rp3.697.500,00	Rp3.697.500,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp3.697.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.697.500,00	Rp0,00	Rp3.697.500,00	Rp3.697.500,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp3.697.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.697.500,00	Rp0,00	Rp3.697.500,00	Rp3.697.500,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp3.697.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.697.500,00	Rp0,00	Rp3.697.500,00	Rp3.697.500,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp3.697.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.697.500,00	Rp0,00	Rp3.697.500,00	Rp3.697.500,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp210.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp210.000,00	Rp0,00	Rp210.000,00	Rp210.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp3.487.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.487.500,00	Rp0,00	Rp3.487.500,00	Rp3.487.500,00	Rp0,00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp805.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp542.500,00	Rp0,00	Rp542.500,00	Rp542.500,00	Rp262.500,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp805.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp542.500,00	Rp0,00	Rp542.500,00	Rp542.500,00	Rp262.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp805.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp542.500,00	Rp0,00	Rp542.500,00	Rp542.500,00	Rp262.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp805.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp542.500,00	Rp0,00	Rp542.500,00	Rp542.500,00	Rp262.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp805.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp542.500,00	Rp0,00	Rp542.500,00	Rp542.500,00	Rp262.500,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp105.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp105.000,00	Rp0,00	Rp105.000,00	Rp105.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp437.500,00	Rp0,00	Rp437.500,00	Rp437.500,00	Rp262.500,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp1.740.428.194,71	Rp1.354.729.813,00	Rp170.544.821,00	Rp1.525.274.634,00	Rp49.215.000,00	Rp17.062.500,00	Rp66.277.500,00	Rp175.000,00	Rp0,00	Rp175.000,00	Rp1.591.727.134,00	Rp148.701.060,71
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp1.670.925.894,71	Rp1.354.729.813,00	Rp170.544.821,00	Rp1.525.274.634,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.525.274.634,00	Rp145.651.260,71
5.1	BELANJA OPERASI	Rp1.670.925.894,71	Rp1.354.729.813,00	Rp170.544.821,00	Rp1.525.274.634,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.525.274.634,00	Rp145.651.260,71
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp1.670.925.894,71	Rp1.354.729.813,00	Rp170.544.821,00	Rp1.525.274.634,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.525.274.634,00	Rp145.651.260,71
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Rp737.427.328,71	Rp639.924.353,00	Rp51.411.473,00	Rp691.335.826,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp691.335.826,00	Rp46.091.502,71
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	Rp565.699.722,50	Rp485.010.214,00	Rp39.003.900,00	Rp524.014.114,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp524.014.114,00	Rp41.685.608,50
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp539.442.632,50	Rp465.788.614,00	Rp35.800.300,00	Rp501.588.914,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp501.588.914,00	Rp37.853.718,50
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	Rp26.257.090,00	Rp19.221.600,00	Rp3.203.600,00	Rp22.425.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.425.200,00	Rp3.831.890,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	Rp55.846.805,20	Rp50.369.872,00	Rp4.076.276,00	Rp54.446.148,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.446.148,00	Rp1.400.657,20
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Rp53.088.505,60	Rp48.063.280,00	Rp3.691.844,00	Rp51.755.124,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.755.124,00	Rp1.333.381,60

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	Rp2.758.299,60	Rp2.306.592,00	Rp384.432,00	Rp2.691.024,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.691.024,00	Rp67.275,60
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	Rp77.203.000,00	Rp69.940.000,00	Rp5.380.000,00	Rp75.320.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp75.320.000,00	Rp1.883.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Rp77.203.000,00	Rp69.940.000,00	Rp5.380.000,00	Rp75.320.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp75.320.000,00	Rp1.883.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	Rp4.135.875,00	Rp3.515.000,00	Rp370.000,00	Rp3.885.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.885.000,00	Rp250.875,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Rp2.654.750,00	Rp2.405.000,00	Rp185.000,00	Rp2.590.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.590.000,00	Rp64.750,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	Rp1.481.125,00	Rp1.110.000,00	Rp185.000,00	Rp1.295.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.295.000,00	Rp186.125,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	Rp28.504.512,00	Rp25.709.100,00	Rp2.100.180,00	Rp27.809.280,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.809.280,00	Rp695.232,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	Rp26.945.671,50	Rp24.405.540,00	Rp1.882.920,00	Rp26.288.460,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.288.460,00	Rp657.211,50
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	Rp1.558.840,50	Rp1.303.560,00	Rp217.260,00	Rp1.520.820,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.520.820,00	Rp38.020,50
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	Rp1.546.747,55	Rp1.400.459,00	Rp106.152,00	Rp1.506.611,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.506.611,00	Rp40.136,55
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Rp1.546.747,55	Rp1.400.459,00	Rp106.152,00	Rp1.506.611,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.506.611,00	Rp40.136,55
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	Rp7.024,33	Rp6.450,00	Rp528,00	Rp6.978,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.978,00	Rp46,33
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp6.672,75	Rp6.156,00	Rp479,00	Rp6.635,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.635,00	Rp37,75
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	Rp351,58	Rp294,00	Rp49,00	Rp343,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp343,00	Rp8,58
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	Rp1.125.781,08	Rp993.316,00	Rp93.609,00	Rp1.086.925,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.086.925,00	Rp38.856,08
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Rp1.060.362,50	Rp947.182,00	Rp85.920,00	Rp1.033.102,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.033.102,00	Rp27.260,50
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	Rp65.418,58	Rp46.134,00	Rp7.689,00	Rp53.823,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp53.823,00	Rp11.595,58
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	Rp3.357.861,05	Rp2.979.942,00	Rp280.828,00	Rp3.260.770,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.260.770,00	Rp97.091,05

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp175.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp175.000,00	Rp0,00	Rp175.000,00	Rp175.000,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp175.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp175.000,00	Rp0,00	Rp175.000,00	Rp175.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp175.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp175.000,00	Rp0,00	Rp175.000,00	Rp175.000,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp175.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp175.000,00	Rp0,00	Rp175.000,00	Rp175.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp175.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp175.000,00	Rp0,00	Rp175.000,00	Rp175.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp175.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp175.000,00	Rp0,00	Rp175.000,00	Rp175.000,00	Rp0,00
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp14.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.000.000,00	Rp0,00	Rp14.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.000.000,00	Rp0,00
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp14.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.000.000,00	Rp0,00	Rp14.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.000.000,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp14.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.000.000,00	Rp0,00	Rp14.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.000.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp14.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.000.000,00	Rp0,00	Rp14.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp14.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.000.000,00	Rp0,00	Rp14.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp14.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.000.000,00	Rp0,00	Rp14.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	Rp14.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.000.000,00	Rp0,00	Rp14.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp99.627.433,99	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp68.961.273,00	Rp22.446.190,00	Rp91.407.463,00	Rp91.407.463,00	Rp8.219.970,99
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp6.624.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.224.250,00	Rp1.388.000,00	Rp6.612.250,00	Rp6.612.250,00	Rp12.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp6.624.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.224.250,00	Rp1.388.000,00	Rp6.612.250,00	Rp6.612.250,00	Rp12.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp6.624.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.224.250,00	Rp1.388.000,00	Rp6.612.250,00	Rp6.612.250,00	Rp12.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp6.624.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.224.250,00	Rp1.388.000,00	Rp6.612.250,00	Rp6.612.250,00	Rp12.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp6.624.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.224.250,00	Rp1.388.000,00	Rp6.612.250,00	Rp6.612.250,00	Rp12.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp6.624.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.224.250,00	Rp1.388.000,00	Rp6.612.250,00	Rp6.612.250,00	Rp12.000,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp8.414.234,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.408.200,00	Rp0,00	Rp8.408.200,00	Rp8.408.200,00	Rp6.034,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1	BELANJA OPERASI	Rp8.414.234,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.408.200,00	Rp0,00	Rp8.408.200,00	Rp8.408.200,00	Rp6.034,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp8.414.234,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.408.200,00	Rp0,00	Rp8.408.200,00	Rp8.408.200,00	Rp6.034,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp8.414.234,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.408.200,00	Rp0,00	Rp8.408.200,00	Rp8.408.200,00	Rp6.034,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp8.241.934,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.236.500,00	Rp0,00	Rp8.236.500,00	Rp8.236.500,00	Rp5.434,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	Rp108.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp108.000,00	Rp0,00	Rp108.000,00	Rp108.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp7.647.984,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.643.500,00	Rp0,00	Rp7.643.500,00	Rp7.643.500,00	Rp4.484,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp485.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp485.000,00	Rp0,00	Rp485.000,00	Rp485.000,00	Rp950,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	Rp172.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp171.700,00	Rp0,00	Rp171.700,00	Rp171.700,00	Rp600,00
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Rp56.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp56.700,00	Rp0,00	Rp56.700,00	Rp56.700,00	Rp0,00
5.1.02.01.04.0120	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	Rp115.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp115.000,00	Rp0,00	Rp115.000,00	Rp115.000,00	Rp600,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp29.260.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.230.000,00	Rp5.220.000,00	Rp28.450.000,00	Rp28.450.000,00	Rp810.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp29.260.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.230.000,00	Rp5.220.000,00	Rp28.450.000,00	Rp28.450.000,00	Rp810.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp29.260.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.230.000,00	Rp5.220.000,00	Rp28.450.000,00	Rp28.450.000,00	Rp810.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp29.260.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.230.000,00	Rp5.220.000,00	Rp28.450.000,00	Rp28.450.000,00	Rp810.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp29.260.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.230.000,00	Rp5.220.000,00	Rp28.450.000,00	Rp28.450.000,00	Rp810.000,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	Rp29.260.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.230.000,00	Rp5.220.000,00	Rp28.450.000,00	Rp28.450.000,00	Rp810.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp3.406.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.187.500,00	Rp219.450,00	Rp3.406.950,00	Rp3.406.950,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp3.406.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.187.500,00	Rp219.450,00	Rp3.406.950,00	Rp3.406.950,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp3.406.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.187.500,00	Rp219.450,00	Rp3.406.950,00	Rp3.406.950,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp3.406.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.187.500,00	Rp219.450,00	Rp3.406.950,00	Rp3.406.950,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp3.406.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.187.500,00	Rp219.450,00	Rp3.406.950,00	Rp3.406.950,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	Rp8.304.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.251.100,00	Rp0,00	Rp8.251.100,00	Rp8.251.100,00	Rp53.500,00
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Rp4.405.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.396.000,00	Rp0,00	Rp4.396.000,00	Rp4.396.000,00	Rp9.400,00
5.1.02.01.04.0119	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	Rp1.430.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.400.000,00	Rp0,00	Rp1.400.000,00	Rp1.400.000,00	Rp30.400,00
5.1.02.01.04.0120	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	Rp1.570.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.565.100,00	Rp0,00	Rp1.565.100,00	Rp1.565.100,00	Rp4.900,00
5.1.02.01.04.0122	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	Rp898.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp890.000,00	Rp0,00	Rp890.000,00	Rp890.000,00	Rp8.800,00
5.1.02.01.04.0409	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.03.04.0068	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2	BELANJA MODAL	Rp181.629.316,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp178.765.550,00	Rp0,00	Rp178.765.550,00	Rp1.221.000,00	Rp0,00	Rp1.221.000,00	Rp179.986.550,00	Rp1.642.766,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp181.629.316,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp178.765.550,00	Rp0,00	Rp178.765.550,00	Rp1.221.000,00	Rp0,00	Rp1.221.000,00	Rp179.986.550,00	Rp1.642.766,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	Rp1.245.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.221.000,00	Rp0,00	Rp1.221.000,00	Rp1.221.000,00	Rp24.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	Rp1.245.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.221.000,00	Rp0,00	Rp1.221.000,00	Rp1.221.000,00	Rp24.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	Rp1.245.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.221.000,00	Rp0,00	Rp1.221.000,00	Rp1.221.000,00	Rp24.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp38.587.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.247.800,00	Rp0,00	Rp38.247.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.247.800,00	Rp339.800,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	Rp15.453.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.429.000,00	Rp0,00	Rp15.429.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.429.000,00	Rp24.600,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	Rp8.779.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.769.000,00	Rp0,00	Rp8.769.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.769.000,00	Rp10.200,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp6.674.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.660.000,00	Rp0,00	Rp6.660.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.660.000,00	Rp14.400,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	Rp23.134.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.818.800,00	Rp0,00	Rp22.818.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.818.800,00	Rp315.200,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	Rp7.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.145.600,00	Rp0,00	Rp7.145.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.145.600,00	Rp4.400,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	Rp15.984.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.673.200,00	Rp0,00	Rp15.673.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.673.200,00	Rp310.800,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	Rp5.746.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.683.200,00	Rp0,00	Rp5.683.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.683.200,00	Rp63.600,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	Rp5.746.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.683.200,00	Rp0,00	Rp5.683.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.683.200,00	Rp63.600,00
5.2.02.06.02.0005	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	Rp5.746.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.683.200,00	Rp0,00	Rp5.683.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.683.200,00	Rp63.600,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	Rp136.049.916,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp134.834.550,00	Rp0,00	Rp134.834.550,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp134.834.550,00	Rp1.215.366,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	Rp114.911.916,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp113.786.100,00	Rp0,00	Rp113.786.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp113.786.100,00	Rp1.125.816,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Rp114.911.916,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp113.786.100,00	Rp0,00	Rp113.786.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp113.786.100,00	Rp1.125.816,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	Rp21.138.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.048.450,00	Rp0,00	Rp21.048.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.048.450,00	Rp89.550,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Rp21.138.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.048.450,00	Rp0,00	Rp21.048.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.048.450,00	Rp89.550,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp132.352.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.300.000,00	Rp6.300.000,00	Rp93.600.000,00	Rp27.075.679,00	Rp5.265.642,00	Rp32.341.321,00	Rp125.941.321,00	Rp6.410.679,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp22.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.807.840,00	Rp4.220.404,00	Rp22.028.244,00	Rp22.028.244,00	Rp771.756,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp22.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.807.840,00	Rp4.220.404,00	Rp22.028.244,00	Rp22.028.244,00	Rp771.756,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp22.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.807.840,00	Rp4.220.404,00	Rp22.028.244,00	Rp22.028.244,00	Rp771.756,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp22.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.807.840,00	Rp4.220.404,00	Rp22.028.244,00	Rp22.028.244,00	Rp771.756,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp22.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.807.840,00	Rp4.220.404,00	Rp22.028.244,00	Rp22.028.244,00	Rp771.756,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Rp1.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp739.000,00	Rp371.000,00	Rp1.110.000,00	Rp1.110.000,00	Rp690.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp21.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.068.840,00	Rp3.849.404,00	Rp20.918.244,00	Rp20.918.244,00	Rp81.756,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp109.552.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.300.000,00	Rp6.300.000,00	Rp93.600.000,00	Rp9.267.839,00	Rp1.045.238,00	Rp10.313.077,00	Rp103.913.077,00	Rp5.638.923,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp109.552.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.300.000,00	Rp6.300.000,00	Rp93.600.000,00	Rp9.267.839,00	Rp1.045.238,00	Rp10.313.077,00	Rp103.913.077,00	Rp5.638.923,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp109.552.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.300.000,00	Rp6.300.000,00	Rp93.600.000,00	Rp9.267.839,00	Rp1.045.238,00	Rp10.313.077,00	Rp103.913.077,00	Rp5.638.923,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp109.552.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.300.000,00	Rp6.300.000,00	Rp93.600.000,00	Rp9.267.839,00	Rp1.045.238,00	Rp10.313.077,00	Rp103.913.077,00	Rp5.638.923,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp97.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.300.000,00	Rp6.300.000,00	Rp93.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp93.600.000,00	Rp4.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp97.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.300.000,00	Rp6.300.000,00	Rp93.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp93.600.000,00	Rp3.600.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Rp400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp400.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	Rp11.952.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.267.839,00	Rp1.045.238,00	Rp10.313.077,00	Rp10.313.077,00	Rp1.638.923,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp10.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.183.700,00	Rp977.377,00	Rp9.161.077,00	Rp9.161.077,00	Rp1.638.923,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp504.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp481.835,00	Rp22.165,00	Rp504.000,00	Rp504.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp648.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp602.304,00	Rp45.696,00	Rp648.000,00	Rp648.000,00	Rp0,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp136.700.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.400.000,00	Rp52.503.000,00	Rp56.903.000,00	Rp72.510.376,00	Rp5.904.640,00	Rp78.415.016,00	Rp135.318.016,00	Rp1.382.284,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp50.129.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.574.476,00	Rp5.904.640,00	Rp49.479.116,00	Rp49.479.116,00	Rp650.584,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp50.129.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.574.476,00	Rp5.904.640,00	Rp49.479.116,00	Rp49.479.116,00	Rp650.584,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp50.129.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.574.476,00	Rp5.904.640,00	Rp49.479.116,00	Rp49.479.116,00	Rp650.584,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp3.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp536.100,00	Rp2.086.500,00	Rp2.622.600,00	Rp2.622.600,00	Rp577.400,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp3.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp536.100,00	Rp2.086.500,00	Rp2.622.600,00	Rp2.622.600,00	Rp577.400,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Rp3.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp536.100,00	Rp2.086.500,00	Rp2.622.600,00	Rp2.622.600,00	Rp577.400,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp46.929.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.038.376,00	Rp3.818.140,00	Rp46.856.516,00	Rp46.856.516,00	Rp73.184,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp46.929.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.038.376,00	Rp3.818.140,00	Rp46.856.516,00	Rp46.856.516,00	Rp73.184,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp36.940.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.071.776,00	Rp2.800.000,00	Rp36.871.776,00	Rp36.871.776,00	Rp68.224,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp9.989.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.966.600,00	Rp1.018.140,00	Rp9.984.740,00	Rp9.984.740,00	Rp4.960,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp82.190.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.400.000,00	Rp52.503.000,00	Rp56.903.000,00	Rp24.592.900,00	Rp0,00	Rp24.592.900,00	Rp81.495.900,00	Rp694.700,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp77.750.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp52.503.000,00	Rp52.503.000,00	Rp24.592.900,00	Rp0,00	Rp24.592.900,00	Rp77.095.900,00	Rp654.700,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp77.750.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp52.503.000,00	Rp52.503.000,00	Rp24.592.900,00	Rp0,00	Rp24.592.900,00	Rp77.095.900,00	Rp654.700,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp8.642.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.570.000,00	Rp0,00	Rp8.570.000,00	Rp8.570.000,00	Rp72.800,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp8.642.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.570.000,00	Rp0,00	Rp8.570.000,00	Rp8.570.000,00	Rp72.800,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	Rp8.642.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.570.000,00	Rp0,00	Rp8.570.000,00	Rp8.570.000,00	Rp72.800,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp69.107.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp52.503.000,00	Rp52.503.000,00	Rp16.022.900,00	Rp0,00	Rp16.022.900,00	Rp68.525.900,00	Rp581.900,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp69.107.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp52.503.000,00	Rp52.503.000,00	Rp16.022.900,00	Rp0,00	Rp16.022.900,00	Rp68.525.900,00	Rp581.900,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rp69.107.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp52.503.000,00	Rp52.503.000,00	Rp16.022.900,00	Rp0,00	Rp16.022.900,00	Rp68.525.900,00	Rp581.900,00
5.2	BELANJA MODAL	Rp4.440.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.400.000,00	Rp0,00	Rp4.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.400.000,00	Rp40.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp4.440.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.400.000,00	Rp0,00	Rp4.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.400.000,00	Rp40.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	Rp4.440.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.400.000,00	Rp0,00	Rp4.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.400.000,00	Rp40.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	Rp4.440.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.400.000,00	Rp0,00	Rp4.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.400.000,00	Rp40.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	Rp4.440.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.400.000,00	Rp0,00	Rp4.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.400.000,00	Rp40.000,00
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp4.380.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.343.000,00	Rp0,00	Rp4.343.000,00	Rp4.343.000,00	Rp37.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp4.380.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.343.000,00	Rp0,00	Rp4.343.000,00	Rp4.343.000,00	Rp37.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp4.380.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.343.000,00	Rp0,00	Rp4.343.000,00	Rp4.343.000,00	Rp37.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp4.380.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.343.000,00	Rp0,00	Rp4.343.000,00	Rp4.343.000,00	Rp37.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp4.380.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.343.000,00	Rp0,00	Rp4.343.000,00	Rp4.343.000,00	Rp37.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer	Rp4.380.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.343.000,00	Rp0,00	Rp4.343.000,00	Rp4.343.000,00	Rp37.000,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp10.675.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.150.000,00	Rp525.000,00	Rp10.675.000,00	Rp10.675.000,00	Rp0,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp10.675.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.150.000,00	Rp525.000,00	Rp10.675.000,00	Rp10.675.000,00	Rp0,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp10.675.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.150.000,00	Rp525.000,00	Rp10.675.000,00	Rp10.675.000,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp10.675.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.150.000,00	Rp525.000,00	Rp10.675.000,00	Rp10.675.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp10.675.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.150.000,00	Rp525.000,00	Rp10.675.000,00	Rp10.675.000,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp10.675.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.150.000,00	Rp525.000,00	Rp10.675.000,00	Rp10.675.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp10.675.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.150.000,00	Rp525.000,00	Rp10.675.000,00	Rp10.675.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp175.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp175.000,00	Rp0,00	Rp175.000,00	Rp175.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp10.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.975.000,00	Rp525.000,00	Rp10.500.000,00	Rp10.500.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp123.375.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.600.000,00	Rp0,00	Rp39.600.000,00	Rp79.399.375,00	Rp4.290.000,00	Rp83.689.375,00	Rp123.289.375,00	Rp85.625,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp123.375.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.600.000,00	Rp0,00	Rp39.600.000,00	Rp79.399.375,00	Rp4.290.000,00	Rp83.689.375,00	Rp123.289.375,00	Rp85.625,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp7.445.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.375.000,00	Rp0,00	Rp7.375.000,00	Rp7.375.000,00	Rp70.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp7.445.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.375.000,00	Rp0,00	Rp7.375.000,00	Rp7.375.000,00	Rp70.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp7.445.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.375.000,00	Rp0,00	Rp7.375.000,00	Rp7.375.000,00	Rp70.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp6.045.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.975.000,00	Rp0,00	Rp5.975.000,00	Rp5.975.000,00	Rp70.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp6.045.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.975.000,00	Rp0,00	Rp5.975.000,00	Rp5.975.000,00	Rp70.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp70.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp5.975.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.975.000,00	Rp0,00	Rp5.975.000,00	Rp5.975.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp1.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.400.000,00	Rp0,00	Rp1.400.000,00	Rp1.400.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	Rp1.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.400.000,00	Rp0,00	Rp1.400.000,00	Rp1.400.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	Rp1.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.400.000,00	Rp0,00	Rp1.400.000,00	Rp1.400.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp115.930.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.600.000,00	Rp0,00	Rp39.600.000,00	Rp72.024.375,00	Rp4.290.000,00	Rp76.314.375,00	Rp115.914.375,00	Rp15.625,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp115.930.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.600.000,00	Rp0,00	Rp39.600.000,00	Rp72.024.375,00	Rp4.290.000,00	Rp76.314.375,00	Rp115.914.375,00	Rp15.625,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp115.930.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.600.000,00	Rp0,00	Rp39.600.000,00	Rp72.024.375,00	Rp4.290.000,00	Rp76.314.375,00	Rp115.914.375,00	Rp15.625,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp54.850.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.844.375,00	Rp3.990.000,00	Rp54.834.375,00	Rp54.834.375,00	Rp15.625,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp54.850.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.844.375,00	Rp3.990.000,00	Rp54.834.375,00	Rp54.834.375,00	Rp15.625,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp799.375,00	Rp0,00	Rp799.375,00	Rp799.375,00	Rp625,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp54.050.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.045.000,00	Rp3.990.000,00	Rp54.035.000,00	Rp54.035.000,00	Rp15.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp61.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.600.000,00	Rp0,00	Rp39.600.000,00	Rp21.180.000,00	Rp300.000,00	Rp21.480.000,00	Rp61.080.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp48.560.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.600.000,00	Rp0,00	Rp29.600.000,00	Rp18.660.000,00	Rp300.000,00	Rp18.960.000,00	Rp48.560.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	Rp3.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.300.000,00	Rp300.000,00	Rp3.600.000,00	Rp3.600.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp800.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp40.160.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.600.000,00	Rp0,00	Rp29.600.000,00	Rp10.560.000,00	Rp0,00	Rp10.560.000,00	Rp40.160.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	Rp2.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.520.000,00	Rp0,00	Rp2.520.000,00	Rp2.520.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	Rp2.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.520.000,00	Rp0,00	Rp2.520.000,00	Rp2.520.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp16.934.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.760.000,00	Rp8.174.000,00	Rp16.934.000,00	Rp16.934.000,00	Rp0,00
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp16.934.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.760.000,00	Rp8.174.000,00	Rp16.934.000,00	Rp16.934.000,00	Rp0,00
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang	Rp16.934.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.760.000,00	Rp8.174.000,00	Rp16.934.000,00	Rp16.934.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
	Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia												
5.1	BELANJA OPERASI	Rp16.934.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.760.000,00	Rp8.174.000,00	Rp16.934.000,00	Rp16.934.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp16.934.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.760.000,00	Rp8.174.000,00	Rp16.934.000,00	Rp16.934.000,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp12.134.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.760.000,00	Rp3.374.000,00	Rp12.134.000,00	Rp12.134.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp12.134.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.760.000,00	Rp3.374.000,00	Rp12.134.000,00	Rp12.134.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp350.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp210.000,00	Rp140.000,00	Rp350.000,00	Rp350.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp384.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp384.000,00	Rp384.000,00	Rp384.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp11.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.550.000,00	Rp2.850.000,00	Rp11.400.000,00	Rp11.400.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp1.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.800.000,00	Rp1.800.000,00	Rp1.800.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp1.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.800.000,00	Rp1.800.000,00	Rp1.800.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp1.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.800.000,00	Rp1.800.000,00	Rp1.800.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp0,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp167.029.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp110.535.000,00	Rp9.500.000,00	Rp120.035.000,00	Rp43.570.000,00	Rp3.375.000,00	Rp46.945.000,00	Rp166.980.000,00	Rp49.500,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp167.029.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp110.535.000,00	Rp9.500.000,00	Rp120.035.000,00	Rp43.570.000,00	Rp3.375.000,00	Rp46.945.000,00	Rp166.980.000,00	Rp49.500,00
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Rp95.279.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.035.000,00	Rp0,00	Rp72.035.000,00	Rp22.670.000,00	Rp525.000,00	Rp23.195.000,00	Rp95.230.000,00	Rp49.500,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp95.279.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.035.000,00	Rp0,00	Rp72.035.000,00	Rp22.670.000,00	Rp525.000,00	Rp23.195.000,00	Rp95.230.000,00	Rp49.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp95.279.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.035.000,00	Rp0,00	Rp72.035.000,00	Rp22.670.000,00	Rp525.000,00	Rp23.195.000,00	Rp95.230.000,00	Rp49.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp84.879.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.035.000,00	Rp0,00	Rp72.035.000,00	Rp12.270.000,00	Rp525.000,00	Rp12.795.000,00	Rp84.830.000,00	Rp49.500,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp84.879.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.035.000,00	Rp0,00	Rp72.035.000,00	Rp12.270.000,00	Rp525.000,00	Rp12.795.000,00	Rp84.830.000,00	Rp49.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp320.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp320.000,00	Rp0,00	Rp320.000,00	Rp320.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp33.850.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.375.000,00	Rp0,00	Rp21.375.000,00	Rp11.950.000,00	Rp525.000,00	Rp12.475.000,00	Rp33.850.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp7.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.500.000,00	Rp0,00	Rp7.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	Rp43.209.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.160.000,00	Rp0,00	Rp43.160.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.160.000,00	Rp49.500,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp6.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.900.000,00	Rp0,00	Rp6.900.000,00	Rp6.900.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp1.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.300.000,00	Rp0,00	Rp1.300.000,00	Rp1.300.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp800.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp500.000,00	Rp0,00	Rp500.000,00	Rp500.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	Rp5.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.600.000,00	Rp0,00	Rp5.600.000,00	Rp5.600.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	Rp3.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.100.000,00	Rp0,00	Rp3.100.000,00	Rp3.100.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.04.0416	Belanja Sewa Elektronik/Electric	Rp2.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.500.000,00	Rp0,00	Rp2.500.000,00	Rp2.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp3.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.500.000,00	Rp0,00	Rp3.500.000,00	Rp3.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp3.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.500.000,00	Rp0,00	Rp3.500.000,00	Rp3.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp3.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.500.000,00	Rp0,00	Rp3.500.000,00	Rp3.500.000,00	Rp0,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp71.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.500.000,00	Rp9.500.000,00	Rp48.000.000,00	Rp20.900.000,00	Rp2.850.000,00	Rp23.750.000,00	Rp71.750.000,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp71.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.500.000,00	Rp9.500.000,00	Rp48.000.000,00	Rp20.900.000,00	Rp2.850.000,00	Rp23.750.000,00	Rp71.750.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp71.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.500.000,00	Rp9.500.000,00	Rp48.000.000,00	Rp20.900.000,00	Rp2.850.000,00	Rp23.750.000,00	Rp71.750.000,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp23.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.900.000,00	Rp2.850.000,00	Rp23.750.000,00	Rp23.750.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp23.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.900.000,00	Rp2.850.000,00	Rp23.750.000,00	Rp23.750.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp23.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.900.000,00	Rp2.850.000,00	Rp23.750.000,00	Rp23.750.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp48.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.500.000,00	Rp9.500.000,00	Rp48.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp48.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.500.000,00	Rp9.500.000,00	Rp48.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp48.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.500.000,00	Rp9.500.000,00	Rp48.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.000.000,00	Rp0,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp11.715.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.715.000,00	Rp0,00	Rp11.715.000,00	Rp11.715.000,00	Rp0,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp11.715.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.715.000,00	Rp0,00	Rp11.715.000,00	Rp11.715.000,00	Rp0,00
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp11.715.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.715.000,00	Rp0,00	Rp11.715.000,00	Rp11.715.000,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp11.715.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.715.000,00	Rp0,00	Rp11.715.000,00	Rp11.715.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp11.715.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.715.000,00	Rp0,00	Rp11.715.000,00	Rp11.715.000,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp11.715.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.715.000,00	Rp0,00	Rp11.715.000,00	Rp11.715.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp11.715.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.715.000,00	Rp0,00	Rp11.715.000,00	Rp11.715.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp315.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp315.000,00	Rp0,00	Rp315.000,00	Rp315.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp11.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.400.000,00	Rp0,00	Rp11.400.000,00	Rp11.400.000,00	Rp0,00
JUMLAH		Rp2.647.272.844,70	Rp1.354.729.813,00	Rp170.544.821,00	Rp1.525.274.634,00	Rp483.815.550,00	Rp85.365.500,00	Rp569.181.050,00	Rp336.028.803,00	Rp49.980.472,00	Rp386.009.275,00	Rp2.480.464.959,00	Rp166.807.885,70
Penerimaan :													
- SP2D:													
UP			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00
GU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp336.028.803,00	Rp24.984.972,00	Rp361.013.775,00	Rp361.013.775,00	Rp0,00
TU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
LS			Rp1.354.729.813,00	Rp170.544.821,00	Rp1.525.274.634,00	Rp483.815.550,00	Rp85.365.500,00	Rp569.181.050,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.094.455.684,00	Rp0,00
GU-KKPD			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
- Potongan:													

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
Saldo Kas			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00

Menyetujui,

-

=
NIP: -

Disiapkan oleh,

PENGGUNA ANGGARAN

YUDHA ASMARA, S.STP

NIP. 198003031998101001